

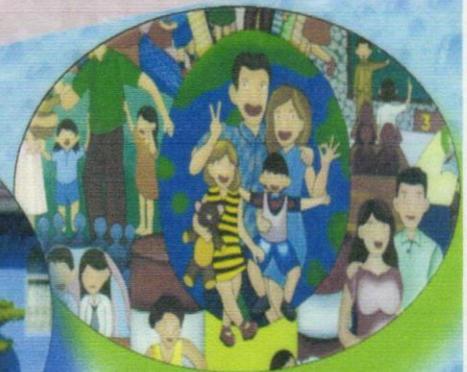


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN KEUANGAN UN AUDIT

TAHUN 2023
TAHUN 2023



Alamat : Jalan Hang Tuah No. 08 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 23645 Fax. (0766) 23644
E-mail : dppkbengkalis@gmail.com





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**Jl. HANGTUAH No. 08
Telp. (0766) 23645 Fax. (0766) 23644
BENGKALIS 28712**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Un Audit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

- (1) Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Laporan Operasional;
- (3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (4) Neraca;
- (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bengkalis, Februari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

H. HAMBALI, S.Pd.I
NIP. 19670305 198811 1 001

Kata Pengantar



uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di awal tahun 2024 ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Un Audit per 31 Desember 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis secara tepat waktu. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan

Keuangan. Dalam Laporan Keuangan Un Audit ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama 1 Tahun Anggaran 2023.

**PP No. 71 Tahun 2010 tentang
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Paragraf 28 Kerangka Konseptual:
Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga/Satuan KERJA Perangkat
Daerah Setidak-tidaknya terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Paragraf 15 menyebutkan, komponen tersebut disajikan oleh tiap-tiap entitas kecuali point e dan point b yang hanya disajikan oleh bagian perbendaharaan umum.

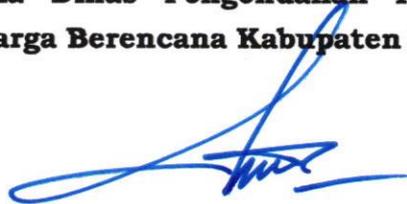
Penyampaian Laporan Keuangan ini merupakan salah satu upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga

dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Keuangan Un Audit Per 31 Desember 2023 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, tanggapan, dukungan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders* sangat diharapkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bengkalis, Februari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis



H. HAMBALI, S.Pd.I
NIP. 19670305 198811 1 001



Daftar Isi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	I	
KATA PENGANTAR	II	
DAFTAR ISI	IV	
RINGKASAN	VII	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
LAPORAN OPERASIONAL		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
NERACA		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
BAB I	Pendahuluan	1
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3	Komponen Laporan Keuangan	4
1.4	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	8
2.1	Ekonomi Makro	8
2.2	Kebijakan Keuangan	11
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	18
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	18
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	19
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	21
4.1	Entitas Akuntansi Keuangan Daerah SKPD	21
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22
4.3	Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	23
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi	38
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	40
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	40
5.1.1	Pendapatan	40
5.1.2	Belanja Operasi	40
5.1.3	Belanja Modal	42
5.1.4	Surplus/Defisit	43

5.2	Laporan Operasional	43
5.2.1	Pendapatan LO	43
5.2.2	Beban Pegawai	44
5.2.3	Beban Barang	44
5.2.4	Beban Jasa	45
5.2.5	Beban Pemeliharaan	46
5.2.6	Beban Perjalanan Dinas	47
5.2.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	47
5.2.8	Beban lain-lain	48
5.2.9	Beban Hibah	48
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas	48
5.3.1	Ekuitas Awal	48
5.3.2	Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	48
4.3.3	Ekuitas akhir	49
5.4	Neraca	49
5.4.1	Kas di Bendaharawan Penerima	49
5.4.2	Kas di Bendaharawan Pengeluaran	49
5.4.3	Piutang Pajak Daerah	49
5.4.4	Piutang Retribusi Daerah	49
5.4.5	Pajar / Uang Muka	50
5.4.6	Persediaan	50
5.4.7	Aset Tetap	51
5.4.8	Akumulasi Penyusutan	53
5.4.9	Aset Lainnya	53
5.4.10	Amortisasi Aset Lainnya	53
5.4.11	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53
5.4.12	Utang Kepada Pihak Ketiga	54
5.4.13	Utang Jangka Pendek	54
5.4.14	Ekuitas	54
BAB VI	Pengungkapan Informasi Lainnya	55
BAB VII	Penutup	59

LAMPIRAN:

- I** Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023
- II** Rekapitulasi Hibah ALOKON & BAST BKKBN
- III** Daftar Persediaan Barang (Stock Opname) Tahun 2023
- IV** Rincian Aset dan Perhitungan Harga Perolehan & Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Rampung Tahun 2023
- V** Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023
- VI** Rekapitulasi Mutasi Aset Lainnya 2023
- VII** Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2023
- VIII** Rekapitulasi Utang dan Bukti Utang Jangka Pendek Lainnya Juni 2023
- IX** Rincian Aset Yang Berasal Dari SKPD Lain dan BAST 2023

- X** Rincian Aset yang Diserahkan Ke SKPD Lain (Transfer Keluar) 2023

RINGKASAN



sesuai pasal PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu entitas akuntansi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Tujuan pelaporan keuangan Un Audit Per 31 Desember 2023 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 Januari s.d 31 Desember 2023 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

1. LAPORAN REALISASI DAN ANGGARAN

Laporan Realisasi dan Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk salah satu SKPD yang mengelola anggaran maupun realisasi pendapatan daerah.

Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 19.564.734.066,00 atau mencapai 93,66% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 18.764.269.646,00 atau 94,03% dari anggarannya sebesar Rp. 19.955.235.010,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 800.464.420,00 atau 85,72% dari anggarannya sebesar Rp. 933.788.000,00.

Realisasi Defisit per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (19.564.734.066,00) yang berarti mencapai 93,66% dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 sebesar minus Rp. (20.889.023.010,00).

	31 Desember 2023		TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
📁 Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
📁 Belanja Daerah	20.889.023.010,00	19.564.734.066,00	19.760.149.330,00
📁 Surplus (Defisit)	(20.889.023.010,00)	(19.564.734.066,00)	(19.760.149.330,00)

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menggambarkan seluruh dana atau uang yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis dalam menjalankan Kegiatan Operasionalnya selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 .

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan LO, Beban, surplus/defisit dari kegiatan Operasional. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk salah satu SKPD yang mengelola pendapatan dan pembiayaan daerah. Laporan Operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Per 31 Desember 2023 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 712.021.380,00, beban operasi sebesar Rp. 19.740.798.504,25 dan Surplus/defisit Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (19.928.374.312,25) Untuk lebih jelasnya, rincian Pendapatan dan beban 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran Laporan Operasional.

Pendapatan	712.021.380,00
Jumlah Pendapatan	712.021.380,00
Beban Pegawai	5.867.250.343,00
Beban Barang	2.423.583.324,25
Beban Jasa	4.861.084.758,00
Beban Pemeliharaan	505.333.677,00
Beban Perjalanan Dinas	4.643.411.402,00
Beban Hibah	180.810.000,00
Beban Penyusutan	899.597.188,00
Beban Amortisasi	0,00
Beban Lain-Lain	1.259.325.000,00
Jumlah Beban	19.740.798.504,25
Surplus/Defisit	(19.928.374.312,25)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN (APBD - P) 2023	REALISASI 2023	RASIO (%)	REALISASI 2022
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.A				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.A1				
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.A2				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.1.1.A3				
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.A4				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah					
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.B				
TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.B1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.B1a				
Dana Alokasi Umum	5.1.1.B1b				
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.B1c				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.B1d				
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.B2				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.Ba				
Dana Penyesuaian	5.1.1.Bb				
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat					
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.B3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.B3a				
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.1.1.B3b				
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi					
Jumlah Pendapatan Transfer					
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.C				
Pendapatan Hibah	5.1.1.C				
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.C				
Pendapatan Lainnya	5.1.1.C				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah					
TOTAL PENDAPATAN					
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.A				
Belanja Pegawai	5.1.2.A1	6.330.233.830,00	5.867.250.343,00	92,69	5.620.191.905,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.A2	13.625.001.180,00	12.897.019.303,00	94,66	12.814.092.524,00
Belanja Subsidi	5.1.2.A3				
Belanja Hibah	5.1.2.A4				
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.A5				
Jumlah Belanja Operasi		19.955.235.010,00	18.764.269.646,00	94,03	18.434.284.429,00
BELANJA MODAL	5.1.2.B				
Belanja Tanah	5.1.2.B1				
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.B2	884.843.000,00	799.714.420,00	90,38	575.429.905,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.B3				750.434.996,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.B4	750.000,00	750.000,00	100,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.B5	48.195.000,00			
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.B6				
Jumlah Belanja Modal		933.788.000,00	800.464.420,00	85,72	1.325.864.901,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.C				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.C				
Jumlah Belanja Tidak Terduga					
JUMLAH BELANJA		20.889.023.010,00	19.564.734.066,00	93,66	19.760.149.330,00

TRANSFER	5.1.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan					
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.B				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.B				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.B				
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan					
JUMLAH TRANSFER					
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER					
SURPLUS (DEFISIT)	5.1.4				
PEMBIAYAAN	5.1.5				
PENERIMAAN	5.1.5.A				
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	5.1.5.A				
Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.A				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
Penerimaan Piutang Daerah					
Total Penerimaan					
PENGELUARAN	5.1.5.B				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.B				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.5.B				
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri					
Pemberian Pinjaman Daerah					
ADB					
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga					
Total Pengeluaran					
PEMBIAYAAN NETTO					
SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	5.1.6	-20.889.023.010,00	-19.564.734.066,00	93,66	-19.760.149.330,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Bengkalis, Desember 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I
PEMBINA TK I
NIP. 19670305 198811 1 001



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff.	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.A.				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.A.1				
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.A.2				
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.A.3				
7	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.A.4				
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah					
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.B.				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil	5.4.1.B.1.a				
12	Dana Alokasi Umum	5.4.1.B.1.b				
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.B.1.c				
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.B.1.d				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pempus - Dana Perimbangan					
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.B.2				
17	Dana Otonomi Khusus					
18	Dana Penyesuaian	5.4.1.B.2.a				
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/ PROVINSI	5.4.1.B.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.B.3.a				
22	Bantuan Keuangan Pemprov/Kab./ Kota Lainnya	5.4.1.B.3.b				
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi					
25	Jumlah Pendapatan Transfer					
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.C.				
27	Pendapatan Hibah	5.4.1.C.1				
28	Pendapatan Lainnya	5.4.1.C.2				
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		712.021.380,00	612.046.950,00		
30	JUMLAH PENDAPATAN		712.021.380,00	612.046.950,00		
31	BEBAN	5.4.2.				
32	BEBAN OPERASI	5.4.2.A.				
33	Beban Pegawai	5.4.2.A.a	5.867.250.343,00	5.620.191.905,00		
34	Beban Persediaan	5.4.2.A.b	2.423.583.324,25	2.822.763.793,50		
35	Beban Jasa	5.4.2.A.c	4.861.084.758,00	4.308.530.022,00		
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.A.d	505.333.677,00	437.100.245,74		
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.A.e	4.643.411.402,00	3.552.583.911,00		
38	Beban Bunga					
39	Beban Subsidi	5.4.2.A.f				
40	Beban Hibah	5.4.2.A.g				
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.A.h				
42	Beban Penyusutan	5.4.2.A.i	899.597.188,00	832.174.684,00		
43	Beban Amortisasi	5.4.2.A.j	0,00	8.229.166,67		
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.A.k				
45	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen					
46	Beban Penghapusan Aset					
47	Beban Hibah Aset	5.4.2.A.l	180.810.000,00	21.838.000,00		
48	Beban Lain-lain	5.4.2.A.m	1.259.325.000,00	1.624.002.125,00		
49	Beban Dana BOS					
50	Jumlah Beban		20.640.395.692,25	19.227.413.852,91		
51	BEBAN TRANSFER	5.4.2.B.				
52	Beban Transfer Bagi hasil Pajak	5.4.2.B.a				
53	Beban Transfer Retribusi	5.4.2.B.b				
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.2.B.c				
55	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa					
56	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
57	Jumlah Beban Transfer					
58	JUMLAH BEBAN					
59	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI		(20.640.395.692,25)	(19.227.413.852,91)		

60	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
61	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.			
62	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.a			
63	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
64	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
65	Jumlah Surplus Non Operasional				
66	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.			
67	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
68	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
69	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
70	Jumlah Defisit Non Operasional				
71	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
72	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
73	POS LUAR BIASA				
74	Pendapatan Luar Biasa				
75	Beban Luar Biasa				
76	POS LUAR BIASA				
77	SURPLUS / DEFISIT - LO	5.4.5.	(19.928.374.312,25)	(18.615.366.902,91)	

Perhatikan Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Bengkalis, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS**

H. HAMBALI, S.Pd.I
PEMBINA TK I
NIP. 19670305 198811 1 001



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Cat.	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	8.064.840.221,51	6.920.057.794,42
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2.	(19.928.374.312,25)	(18.615.366.902,91)
3	RK PPKD	5.6.3.	19.564.734.066,00	19.760.149.330,00
4	RK untuk Penerimaan Aktiva Tetap/Aset Tetap SKPD	5.6.4.	710.227.800,00	
5	RK untuk Penyerahan Aktiva Tetap/Aset Tetap SKPD	5.6.5.	(629.137.272,57)	
6	RK untuk Penerimaan Kewajiban	5.6.6.		
7	RK untuk Penyerahan Kewajiban	5.6.7.		
8	RK untuk Penerimaan Aktiva	5.6.8.		
9	RK untuk Penyerahan Aktiva	5.6.9.		
10	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.10.		-
11	LAIN-LAIN:	5.6.11.	446.409.472,57	
12	Koreksi Nilai Piutang	5.6.11.A		
13	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	5.6.11.B		
14	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.11.C		
15	Koreksi Investasi Non Permanen	5.6.11.D		
16	Koreksi Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	5.6.11.E		
17	Koreksi Nilai Aset Tetap	5.6.11.F		
18	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.11.G	446.409.472,57	
19	Koreksi Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi	5.6.11.H		
20	Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	5.6.11.I		
21	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.6.11.J		
22	Koreksi Nilai Aset Lain-lain	5.6.11.K		
23	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.6.11.L		
24	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	5.6.11.M		
25	Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	5.6.11.N		
26	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	5.6.11.O		
27	Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.11.P		
28	Koreksi Kas Lainnya	5.6.11.Q		
	Total	5.6.4	8.228.699.975,26	8.064.840.221,51

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Bengkalis, Februari 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I
PEMBINA TK I
NIP. 19670305 198811 1 001



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**NERACA
PER 31 DESEMBER 2023**

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total saldo pos Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.228.699.975,26 mengalami penurunan/kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp. 163.859.753,75 jika dibandingkan dengan ekuitas Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.064.840.221,51.

4. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per tanggal 31 Desember 2023 .

Jumlah Aset bersih (setelah penyusutan) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.240.519.640,26. yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 71.505.990,00 Aset Tetap sebesar Rp. 8.169.013.650,26 dan aset lainnya Rp. 0,00.

Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2023 memiliki kewajiban (hutang) jangka pendek sebesar Rp. 11.819.665,00 Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.228.699.975,26.

	TA 2023	TA 2022
 Aset	8.228.699.975,26	8.075.974.914,51
 Aset Lancar	71.505.990,00	126.459.496,25
 Aset Tetap	8.169.013.650,26	7.949.515.418,26
 Aset Lainnya	0,00	0,00
 Kewajiban	11.819.665,00	11.134.693,00
 Kewajiban Jk. Pendek dan Panjang	11.819.665,00	11.134.693,00
 Ekuitas	8.228.699.975,26	8.064.840.221,51
 Ekuitas	8.228.699.975,26	8.064.840.221,51

5. PELAPORAN KINERJA

Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah merencanakan untuk melaksanakan 4 (Empat) Program, 16 Sub Program dan 53 (Lima Puluh Tiga) Kegiatan dengan anggaran Belanja yang tersedia sebesar Rp. 20.889.023.010,00.

Hingga akhir tahun 31 Desember tahun anggaran 2023, belanja yang telah terealisasi sebesar Rp. 19.564.734.066,00 atau mencapai 93,66% dari yang

dianggarkan sebesar Rp. 20.889.023.010,00 dengan capaian kinerja fisik (output) sebesar 99,51%.

6. INFORMASI LAINNYA

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 09 Tahun 2008, terhitung mulai awal Januari 2009, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya Perda tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak mengalami perubahan nama organisasi.



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER
2023**



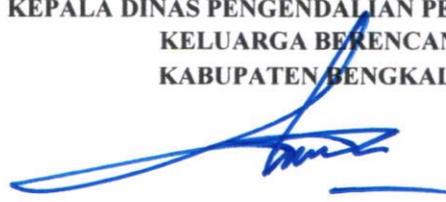
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Reff	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2	3	4	5
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.A		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.A.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.2		
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.3		
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.A.4		
Kas di Bendahara JKN	5.3.1.A.5		
Kas di BLUD	5.3.1.A.6		
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.A.7		
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak	5.3.1.A.8		
Piutang Retribusi	5.3.1.A.8		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.A.8		
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	5.3.1.A.8		
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.3.1.A.8		
Piutang Lainnya	5.3.1.A.8		
Penyisihan Piutang	5.3.1.A.9		
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.A.10		
Persediaan	5.3.1.A.11	71.505.990,00	126.459.496,25
Jumlah Aset Lancar		71.505.990,00	126.459.496,25
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.B		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1		
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	5.3.1.B.1		
Jumlah Investasi Non Permanen			
Investasi Permanen	5.3.1.B.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.B.2		
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang			
ASET TETAP	5.3.1.C		
Tanah	5.3.1.C.1	373.525.000,00	373.525.000,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.C.2	7.317.955.762,55	6.645.269.815,12
Gedung dan Bangunan	5.3.1.C.3	7.324.534.075,85	7.324.534.075,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.C.4		
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.C.5	35.219.800,00	35.219.800,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.C.6		
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.C.7	(6.882.220.988,14)	(6.429.033.272,71)
Jumlah Aset Tetap		8.169.013.650,26	7.949.515.418,26
DANA CADANGAN	5.3.1.D		
Dana Cadangan	5.3.1.D		
Jumlah Dana Cadangan (41)			
ASET LAINNYA	5.3.1.E		
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.E.1		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.E.2		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.E.3	39.500.000,00	39.500.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		-39.500.000,00	-39.500.000,00
Aset Lain-lain	5.3.1.E.5		
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		8.240.519.640,26	8.075.974.914,51

KEWAJIBAN	5.3.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.A		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.A.1		
Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri	5.3.2.A.2		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.A.3		
Utang Pihak Ketiga	5.3.2.A.4		
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.A.5	11.819.665,00	11.134.693,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.819.665,00	11.134.693,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.B		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan			
Utang Dalam Negeri - Obligasi			
Premium (Diskonto) Obligasi			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Jangka Panjang Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
JUMLAH KEWAJIBAN		11.819.665,00	11.134.693,00
EKUITAS	5.3.3.	8.228.699.975,26	8.064.840.221,51
JUMLAH EKUITAS		8.228.699.975,26	8.064.840.221,51
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		8.240.519.640,26	8.075.974.914,51

Bengkalis, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS**



H. HAMBALI, S.Pd.I
PEMBINA TK I
NIP. 19670305 198811 1 001



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023**



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan, dalam hal ini Laporan Keuangan Un Audit Tahun 2023. Laporan Ini disampaikan sebagai wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Tujuan pelaporan keuangan Laporan Keuangan Un Audit Tahun 2023 ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 Januari s.d 31 Desember 2023 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Permendagri Nomor 21 Tahun Anggaran 2011;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.
- q) Peraturan Bupati Bengkalis (PERBUP) No. 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- r) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Bupati Bengkalis No. 58 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
- s) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.
- u) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.
- v) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.
- w) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

1.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan pokok yang disajikan terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan LO, Beban, surplus/defisit dari kegiatan Operasional.

c) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yaitu dampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar seperti Persediaan, perubahan nilai aset.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full discloser*).

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri dari 7 (*tujuh*) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang informasi umum berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
2. Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
3. Komponen laporan keuangan;
4. Serta sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Bab ini terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. **Ekonomi Makro**, memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran.
2. **Kebijakan Keuangan**, memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi keuangan.
3. **Pencapaian Target Kinerja**, memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPD berupa:

1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan** yaitu gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan atau gambar.
2. **Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**; berisi penjelasan faktor pendorong serta penghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang terbagi atas 4 (empat) bagian berikut:

1. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**, menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.
2. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
3. **Basis Pengakuan Dan Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengakuan dan pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan.
4. **Penerapan Kebijakan Akuntansi** Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah atau belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAP.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab ini menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terbagi atas 2 (dua) bagian yakni:

1. **Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**, mencakup: pendapatan, belanja, dan surplus/defisit.
2. **Penjelasan atas Pos-pos Neraca**, mencakup: aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. **Penjelasan atas Pos-pos laporan Operasional.**
4. **Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.**

Bab VI Pengungkapan Informasi Lainnya

Bab ini memuat penjelasan tambahan mengenai hal-hal lain yang memerlukan perhatian dan atau belum diinformasikan dalam bab sebelumnya.

Bab VII Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup atas catatan laporan keuangan yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan penting berkaitan dengan pelaporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan yang terletak di daratan dan kepulauan, yaitu: untuk wilayah daratan meliputi Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kecamatan Bandar Laksamana, Sedangkan wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Rukat, Kecamatan Rukat Utara, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan yang terdiri dari 136 desa 19 Kelurahan mengalami kenaikan jika dibandingkan jumlah desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08-15 Tahun 2012 yaitu: 155 Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2019 Rukun Tetangga Kabupaten Bengkalis mengalami penambahan dari 3021 Rukun Tetangga tahun 2018 menjadi 3034 Rukun Tetangga tahun 2019.

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 207°37,2' - 0055°33,6' Lintang Utara dan 100°57'57,6' - 102°30'25,2' Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kep. Meranti.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana Perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 KM, Sungai Siak Kecil 90 KM dan Sungai Mandau 87 KM.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 KM², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Di antara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 kilometer, Sungai Siak Kecil 90 kilometer dan Sungai Mandau 87 kilometer.

Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang sangat strategis, sebab disamping berhadapan langsung dengan Negara tetangga, yakni Malaysia, yang hanya dipisahkan dengan Selat Malaka yang sejak dahulu dikenal sebagai jalur perdagangan Internasional yang ramai, juga berada pada posisi segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT) dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT).

Di samping letaknya yang strategis Kabupaten Bengkalis menyimpan sumber daya alam yang cukup besar bahkan kekayaan alam bumi Bengkalis, baik sektor migas seperti minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu maupun non migas, seperti hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perternakan, perkebunan, dan pariwisata.

Penduduk Kabupaten Bengkalis bersifat heterogen dengan mayoritas penganut agama Islam, dan di samping Suku Melayu yang merupakan mayoritas juga terdapat suku-suku lainnya seperti: Suku Minang, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Batak, Tionghoa, dan sebagainya.

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 582.973 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 573.504, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2022 mencapai 68 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di sebelas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan sebesar 299 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bandar Laksamana sebesar 13 jiwa/Km².

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis tergolong rendah apabila dibandingkan dengankabupaten/kota di Provinsi Riau. Baik secara absolut maupun persentase. Garis kemiskinan per kapita penduduk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 648.933,00 dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 604.925,00 dan persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 6,32 persen.

Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis bisa diukur salah satunya dengan angka PDRB. PDRB menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB Kabupaten Bengkalis Bengkalis pada tahun 2021 dengan migas sangat besar mencapai 139,61 triliun rupiah (ADHB). Sementara jika tanpa migas hanya sebesar 73,40 trilliun rupiah.

Dengan besaran PDRB tanpa migas, perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen. Hal ini terjadi karena meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena pemulihan ekonomi yang terjadi pasca pandemi COVID-19. COVID-19. Selain itu pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian juga tidak mengalami penurunan tidak sedalam tahun sebelumnya. Sama seperti tahun sebelumnya, struktur ekonomi Bengkalis masih didominasi oleh tiga sektor utama yang sering disebut sebagai leading sector. Posisi pertama leading sektor adalah sektor pertambangan dan penggalian (53 persen), diikuti oleh sektor industri pengolahan (21 persen), dan yang ketiga adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (13 persen).

Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Bengkalis menurut lapangan usaha sebesar 176 013,38 miliar rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 75 878,58 miliar rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, atau tumbuh 2,22 persen dibandingkan tahun 2021. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa lainnya (19,55 persen) dan terendah pada sektor pertambangan dan penggalian (0,19 persen) yang justru mengalami penurunan.

Struktur PDRB Kabupaten Bengkalis tahun 2022 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sector pertambangan dan penggalian. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB sebesar 63,15 persen, sedangkan menurut pengeluaran masih didominasi oleh net ekspor barang dan jasa sebesar 60,87 persen.

Negara tujuan utama ekspor Kabupaten Bengkalis adalah negara-negara di Asia seperti Negara Tiongkok 454.165,08 Ribu US\$ dimana nilai ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada urutan kedua yakni Singapura sebesar 331.832,10 Ribu US\$. Selanjutnya Malaysia sebesar 176.410,81 Ribu US\$ dan Korea Selatan sebesar 67.293,89 Ribu US\$.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi: *Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi*.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan

📖 Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

- ☞ Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja Operasi dan Belanja Modal.

Masing-masing jenis belanja tersebut terbagi atas obyek dan rincian obyek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

📖 Efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan:

- ☞ Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
- ☞ Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

☞ Meningkatkan keserasian pembangunan di daerah dan percepatan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan upaya-upaya dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya.

☞ Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

✓ **Program** adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

☞ Contoh Nama Program:

- Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

✓ **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

☞ Contoh Nama Kegiatan:

- Perencanaan Pembangunan Jalan
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

✓ **Masukan (*input*)** adalah sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa

✓ **Keluaran (*output*)** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

✓ **Hasil (*outcome*)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

✓ **Indikator Kinerja (*performance indicator*)** adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.

☞ Contoh Indikator Kinerja:

- Panjang Jalan.
- Frekuensi Sosialisasi.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 No. 59 Tahun 2007, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD untuk pengelolaan urusan wajib otonomi daerah; pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah; perangkat daerah; kepegawaian dan urusan wajib persandiaan Pengelolaan urusan tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah merencanakan untuk melaksanakan 4 (Empat) Program, 16 Sub Program dan 53 (Lima Puluh Tiga) Kegiatan dengan anggaran Belanja yang tersedia sebesar Rp. 20.889.023.010,00.

Hingga akhir tahun 31 Desember tahun anggaran 2023, belanja yang telah terealisasi sebesar Rp. 19.564.734.066,00 atau mencapai 93,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 20.889.023.010,00 dengan capaian kinerja fisik (output) sebesar 94,40%. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.4
Capaian Target Kinerja APBD Tahun 2023
PER 31 Desember 2023

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Perbandingan			Capaian Kinerja (%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perseentase (%)	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	96.600.000,00	96.600.000,00	100,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	1	6.330.233.830,00	5.867.250.343,00	92,69	94,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	672.000.000,00	672.000.000,00	100,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	345.483.000,00	344.933.540,00	99,84	100,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	1.817.544.500,00	1.749.286.414,00	96,24	96,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	644.060.000,00	591.595.420,00	91,85	97,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	548.046.320,00	464.026.794,00	84,67	89,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	740.700.000,00	719.343.677,00	97,12	98,00
9.	Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3	185.530.500,00	175.898.543,00	94,81	98,00
10.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/ kota	3	248.146.900,00	244.852.300,00	98,67	99,00
11.	Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	5	718.500.000,00	705.500.000,00	98,19	99,40
12.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB(PKB/PLKB)	3	2.559.918.200,00	2.466.163.974,00	96,34	97,33
13.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/ kota	7	2.301.453.660,00	2.014.495.348,00	87,53	89,57
14.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	3	534.817.800,00	478.266.400,00	89,43	63,33
15.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6	3.029.629.900,00	2.883.973.903,00	95,19	93,67
16.	Pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KAB/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	116.358.400,00	90.547.410,00	77,82	80,00
TOTAL		53	20.889.023.010,00	19.564.734.066,00	93,66	94,47

Berdasarkan Tabel II.4 di atas, jika dilakukan perbandingan antara realisasi *input* (dana) dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan sebesar 93,66% maka masih menyisakan anggaran belanja sebesar Rp. 1.324.288.944,00 atau 6,34% dari anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu tahun 2023. Rincian selengkapnya atas capaian target kinerja masing-masing kegiatan sebagaimana disajikan pada **Lampiran I**.

BAB III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN
TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta kondisi ekonomi Kabupaten Bengkalis secara umum, pencapaian kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel III.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Di atas/(di bawah) Anggaran	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)	(6)= (5/3)x100%
1	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0,00
2	Pendapatan Transfer	0	0	0	0,00
3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0	0,00
4	Jumlah Pendapatan (1 s/d 3)	0	0	0	0,00
	Belanja Operasi:	19.955.235.010,00	18.764.269.646,00	(1.190.965.364,00)	(5,97)
5	Belanja Pegawai	6.330.233.830,00	5.867.250.343,00	(462.983.487,00)	(7,31)
6.	Belanja Barang & Jasa	13.625.001.180,00	12.897.019.303,00	(727.981.877,00)	(5,34)
	Belanja Modal	933.788.000,00	800.464.420,00		
7	Belanja Modal	933.788.000,00	800.464.420,00	(133.323.580,00)	(14,28)
	Jumlah Belanja (5 s/d 8)	20.889.023.010,00	19.564.734.066,00	(1.324.288.944,00)	(6,34)
	Surplus/(Defisit) (4 - 9)	(20.889.023.010,00)	(19.564.734.066,00)	(1.324.288.944,00)	(6,34)

Lihat Laporan Realisasi Anggaran APBD-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 pada halaman muka (on the face) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPD serta faktor pendorong serta penghambat pencapaian target kinerja sebagaimana diuraikan pada **butir 3.2**

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

A. Pendapatan

Seperti yang tersaji dalam **Tabel III.1** di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran maupun realisasi pendapatan.

B. Belanja

Sesuai dengan kebijaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan, pengendalian belanja yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik, administrasi maupun keuangan.

Realisasi belanja secara keseluruhan masih di bawah anggaran sebagaimana diuraikan berikut ini:

📖 Ditinjau dari **jenis belanja**:

- ☞ Realisasi Belanja Operasi yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 18.764.269.646,00 atau 94,03% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 19.955.235.010,00.
- ☞ Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 800.464.420,00 atau 85,72% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 933.788.000,00.

Secara umum, keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di lapangan, namun tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan 100%.

C. Surplus/Defisit

Dari **Tabel III.1** di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengalami defisit sebesar **Rp. (19.564.734.066,00)** atau 93,66% dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar **Rp. (20.889.023.010,00)**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 31 Desember Tahun Anggaran 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 1.324.288.944,00 atau 6,34 % dari anggarannya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 ini sebagian besar masih mengacu dan berpedoman kepada:

1. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 s.d 11 termasuk Pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP.
2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pda pemerintah daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikiasi Barang Milik Daerah.
4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2015 tanggal 04 November 2015 yang mencakup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis No. 1 sampai dengan No. 21 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini penyusunan kebijakan akuntansi yang bersifat formal dan baku untuk diberlakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dalam proses sosialisasi.

4.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah SKPD

Sebagai salah satu entitas akuntansi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 10 dan 26 serta pasal 232 Permendagri No. 13 Tahun 2006 No.59 Tahun 2007 **maupun** pasal 1 butir 12 dan 16 serta pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2020 yang berada dalam pengelolaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

- ☞ **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- ☞ **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
- ☞ **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- ☞ **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis cash untuk pengakuan unsur pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** (*accrual basis*) untuk pengakuan unsur Pendapatan LO, Beban, Pembiayaan LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas,

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas akuntansi. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa unsur aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah, tanpa memperhatikan saat terjadinya kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan.

1) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kab. Bengkalis, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA diakui pada saat

1. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima oleh entitas lain di luar Pemerintahan Daerah lain atas nama BUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengembalian yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih yaitu pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2) Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kab. Bengkalis yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kab. Bengkalis memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kab. Bengkalis menerima kas yang berasal dari pendapatan atau pendapatan terealisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen.
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LO. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan LO pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah,

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum daerah atau pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal Badan Layan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi asset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengakuan beban pada SKPD terdiri dari:

1. Beban Pegawai

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS Beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

2. Beban Barang dan Jasa

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang dan jasa diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/KPA.

Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara (BA) yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh Pihak Ketiga diterima oleh Panitia Penerima Barang SKPD/Dinas.

Khusus untuk beban persediaan, digunakan metode pendekatan aset, artinya setiap pembelian persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah/SKPD langsung akan menambah aset yaitu pada akun persediaan. Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual, yang menuntut dilakukannya pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan.

Beban Penyusutan menggunakan metode garis lurus.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kab. Bengkalis, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kab. Bengkalis terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kab. Bengkalis, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kab. Bengkalis, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam

periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

(1) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang terdiri dari:

- ☞ Kas di Bendaharawan Penerima mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendaharawan penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendaharawan penerimaan yang bersangkutan.
- ☞ Kas di Bendaharawan Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendaharawan pengeluaran yang berasal dari sisa uang

muka kerja yang belum disetorkankan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

☞ Dikonsolidasikan (yakni ke perkiraan Rekening Koran Bendaharawan Umum Daerah).

Keseluruhan perkiraan (*account*) ini disajikan sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

(2) Panjar/Uang Muka

Akun atau perkiraan (*account*) ini dipergunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dilakukan namun imbal jasa atau prestasi atas pengeluaran tersebut belum diterima. Panjar akan dicatat sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran bilamana imbal jasa atau prestasi telah diterima. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasinya

(3) Piutang Pajak Daerah

Akun atau perkiraan (*account*) ini merupakan piutang yang diakui atas Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Daerah lainnya yang sudah ada ketetapannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKP/SKPT), tetapi belum dilakukan penyetoran. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasinya.

(4) Piutang Retribusi Daerah

Akun ini merupakan piutang yang diakui atas Retribusi Daerah yang sudah ada ketetapannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Retribusi/Surat Ketetapan Retribusi Tambahan (SKR/SKRT), tetapi belum dilakukan penyetoran. Akun ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasinya.

(5) Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan piutang di luar piutang pajak dan retribusi daerah. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

(6) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- ☞ Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- ☞ Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- ☞ Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- ☞ Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan terhadap persediaan:

- ☞ Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- ☞ Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- ☞ Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- ☞ Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan asset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- ☞ Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- ☞ Harga Pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ☞ Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari seluruh/sebagian APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut ke kondisi yang bias dimanfaatkan atau bekerja. Apabila penilaian aset dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(1) Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

i. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah pertama kali diakui sebesar biaya perolehan, yaitu mencakup biaya pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan, jalan dan irigasi, dan jaringan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut atau dimaksudkan untuk dimusnahkan.

ii. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

iii. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan Pajak.

iv. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Biaya perolehan aset jalan, irigasi dan jaringan meliputi, biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap pakai/digunakan.

v. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

vi. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap.

(2) Pengukuran Aset Tetap

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal tanpa memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization treshold*) mengingat hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi.
- Seluruh aset tetap tersebut hingga saat ini belum dilakukan penghitungan penyusutan baik dalam hal penyajian pada neraca maupun pengakuan beban.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan Aset Tetap (Belanja Pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada APBD tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja

modal pada APBD dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ☞ Pemeliharaan dan perbaikan umumnya bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi aset tetap agar dapat dimanfaatkan secara normal.
 - ☞ Pemugaran/rehab total bertujuan untuk menambah umur atau memperpanjang masa manfaat aset tetap.
 - ☞ Penambahan bertujuan untuk menambah kapasitas atau memperbesar manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Aset Tetap yang dicatat dalam Neraca ini merupakan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yakni:
- ☞ merupakan aset yang memiliki sifat berwujud (*tangible asset*);
 - ☞ mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - ☞ biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - ☞ tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - ☞ diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca merupakan aset tetap yang **hak penguasaan dan/atau hak kepemilikannya** berada pada SKPD cq. Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun entitas lainnya.

- Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar maupun aset tetap.

4.3.5. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

a) Klasifikasi Kewajiban

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

i. Rekening Koran (keluar) Bendaharawan Umum Daerah R/K (K) BUD atau Uang Muka dari BUD)

Merupakan akun untuk menampung transaksi belanja yang berasal dari uang yang diperoleh SKPD dari

Bendaharawan Umum Daerah. Akun ini akan dicatat di sebelah kredit untuk transaksi belanja dengan pembayaran langsung/SPM-LS maupun untuk pengisian kas SKPD melalui penerbitan SPM-UP, SPM-GU maupun SPM-TU. Pada akhir tahun, perkiraan ini akan ditutup dan saldonya akan dipindahkan ke bagian Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan (yakni ke perkiraan Rekening Koran Bendaharawan Umum Daerah).

ii. Pendapatan yang Ditangguhkan

Merupakan akun sementara untuk menampung kas yang diterima Bendaharawan Penerimaan (di catat di sisi kredit) maupun yang disetorkan oleh Bendaharawan Penerima ke Kas Daerah (di catat di sisi debet). Akun ini juga dipergunakan untuk mencatat pengakuan atas terjadinya piutang atas pendapatan.

iii. Utang kepada Pihak Ketiga (*accounts payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca awal.

Apabila pihak ketiga/rekanan membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh pemerintah sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca.

iv. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dilakukannya.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

v. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang selain bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (*account payable*), utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, dan uang muka dari Kas Umum Daerah.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

b) Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.6. Kebijakan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

1. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

2. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga

semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah metode Garis Lurus dengan rumus:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, **diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penerapan Masa Manfaat Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.**

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 **Pendapatan** Rp **0.00**

Akun ini untuk menunjukkan jumlah penerimaan yang bersumber dan diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bukan merupakan salah satu SKPD yang mengelola pendapatan daerah.

5.1.2 **Belanja Operasi** Rp **18.764.269.646,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun per 31 Desember 2023 sebesar 94,03% dari anggarannya sebesar Rp. 19.955.235.010,00 yang terdiri dari:

➤ Belanja Pegawai	Rp 5.867.250.343,00
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.897.019.303,00
Jumlah	Rp 18.764.269.646,00

Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.867.250.343,00 atau 92,69% dari anggaran sebesar Rp. 6.330.233.830,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

➤ Gaji dan Tunjangan:	Rp. 2.780.742.343,00
▪ Gaji Pokok PNS	Rp 2.026.903.984,00
▪ Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 192.342.134,00
▪ Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 97.370.000,00
▪ Belanja Tunj Fungsional ASN	Rp 69.430.000,00

▪ Belanja Tunjangan Fung Umum ASN	Rp	86.730.000,00
▪ Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp	108.992.100,00
▪ Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	13.161.411,00
▪ Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp	26.023,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	169.184.053,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp	4.112.538,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	12.490.100,00
➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN:	Rp	2.796.848.000,00
Berdasarkan Beban Kerja	Rp	1.219.143.497,00
Berdasarkan kondisi kerja	Rp	0,00
Berdasarkan prestasi kerja	Rp	1.577.704.503,00
Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	Rp	289.660.000,00
Jumlah	Rp	5.867.250.343,00

Adapun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.897.019.303,00 atau 94,66% dari anggaran sebesar Rp. 13.625.001.180,00 yang dipergunakan untuk membiayai belanja sebagai berikut:

➤ Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	1.656.608.438,00
➤ Belanja Bahan/Material	Rp	0,00
➤ Belanja Jasa Kantor	Rp	4.616.883.906,00
➤ Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp	0,00
➤ Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	0,00
➤ Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	19.000.000,00
➤ Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
➤ Belanja Sewa Perlalatan & Mesin	Rp	0,00
➤ Belanja Makanan dan Minuman	Rp	0,00
➤ Belanja Pakaian Kerja	Rp	0,00
➤ Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	9.515.880,00
➤ Belanja Perjalanan Dinas	Rp	4.643.411.402,00
➤ Belanja pemeliharaan	Rp	477.274.677,00
➤ Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi &	Rp	215.000.000,00

Bimbingan teknis PNS		
➤ Honorarium PNS	Rp	0,00
➤ Honorarium Non PNS	Rp	0,00
➤ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	1.259.325.000,00
Jumlah	Rp	12.897.019.303,00

5.1.3 Belanja Modal

Rp 800.464.420,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 untuk memperoleh aset tetap yang digunakan untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun untuk dimanfaatkan masyarakat umum yaitu 800.464.420,00 atau 85,72% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 933.788.000,00 yang terdiri dari:

➤ Tanah	Rp	0,00
➤ Peralatan dan Mesin	Rp	751.685.830,00
➤ Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	750.000,00
➤ Aset Tetap Lainnya	Rp	48.028.590,00
Jumlah	Rp	800.464.420,00

Adapun rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

- ❖ **Belanja Modal peralatan dan mesin** sebesar **Rp. 751.685.830,00** yang di akui menjadi aset sebesar Rp. 543.566.830,00, tidak masuk kapitalisasi aset sebesar Rp. 27.309.000,00, dan Belanja modal tidak menjadi asset sebab diserahkan Kepada Pihak Ketiga Rp. 180.810.000,00.
- ❖ **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** sebesar **Rp. 0,00** yang diakui menjadi aset sebesar Rp. 0,00, tidak masuk kapitalisasi aset gedung dan dan bangunan sebesar Rp. 0,00, dan masuk ke kategori peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,00.

- ❖ **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan** sebesar **Rp. 750.000,00** ini tidak masuk kapitalisasi Aset Jalan, irigasi dan Jaringan.
- ❖ **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**, sebesar **Rp. 48.028.590,00**, belanja modal ini di reklas ke Aset Peralatan dan Mesin.

5.1.4 Surplus/(Defisit) Rp (19.564.734.066,00)

Jumlah tersebut merupakan defisit anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 31 Desember Tahun Anggaran 2023. Total realisasi belanja sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. (19.564.734.066,00) atau 93,66% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. (20.889.023.010,00). Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak mengelola pendapatan daerah.

Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.324.288.944,00 atau 6,34% dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar Rp. (20.889.023.010,00).

5.2 Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan LO Rp 712.021.380,00

Akun ini untuk menunjukkan jumlah penerimaan yang bersumber dan diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Pendapatan LO adalah Hak Pemerintah daerah yang diakui di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bukan merupakan salah satu SOPD yang mengelola pendapatan daerah. Laporan Operasional menyajikan

pos-pos Pendapatan ,LO, Beban, surplus/defisit dari kegiatan Operasional. Pendapatan LO Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat BKKBN Provinsi Riau sebesar Rp. 712.021.380,00 berupa alat-alat/Obat-obatan kontrasepsi. Adapun Berita Acara Penerimaan Hibah terlampir pada **Lampiran II**.

5.2.2 Beban Pegawai **Rp 5.867.250.343,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

➤ Gaji dan Tunjangan:	Rp. 2.780.742.343,00
▪ Gaji Pokok PNS	Rp 2.026.903.984,00
▪ Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 192.342.134,00
▪ Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 97.370.000,00
▪ Belanja Tunj Fungsional ASN	Rp 69.430.000,00
▪ Belanja Tunjangan Fung Umum ASN	Rp 86.730.000,00
▪ Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp 108.992.100,00
▪ Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 13.161.411,00
▪ Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 26.023,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp 169.184.053,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp 4.112.538,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp 12.490.100,00
➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN:	Rp 2.796.848.000,00
▪ Berdasarkan Beban Kerja	Rp 1.219.143.497,00
▪ Berdasarkan kondisi kerja	Rp 0,00
▪ Berdasarkan prestasi kerja	Rp 1.577.704.503,00
▪ Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	Rp 289.660.000,00
Jumlah	Rp 5.867.250.343,00

5.2.3 Beban Barang **Rp 2.423.583.324,25**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023.

Adapun rincian beban tersebut adalah sebagai berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

❖ Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp.	0,00
❖ Beban Bahan-Bahan Kimia	Rp.	0,00
❖ Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	2.100.000,00
❖ Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp.	10.051.000,00
❖ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp.	0,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	262.924.700,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp.	52.020.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	28.545.300,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	14.593.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	1.593.900,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp.	59.609.340,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp.	42.055.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp.	73.688.200,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp.	0,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	37.130.000,00
❖ Beban Obat-Obatan-Obat	Rp.	790.132.486,25
❖ Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp.	8.570.398,00
❖ Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp.	231.360.000,00
❖ Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	402.285.000,00
❖ Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	93.015.000,00
❖ Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp.	0,00
❖ Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	313.910.000,00

5.2.4 Beban Jasa **Rp 4.617.568.878,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

• Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp.	115.150.000,00
• Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.	246.700.000,00
• Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp.	1.422.300.000,00
• Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp.	0,00
• Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	174.000.000,00
• Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp.	89.600.000,00
• Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp.	231.400.000,00
• Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp.	672.000.000,00
• Beban Jasa Tenaga Supir	Rp.	96.000.000,00
• Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp.	7.500.000,00
• Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.	112.800.000,00
• Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp.	24.750.000,00
• Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp.	150.000.000,00
• Beban Tagihan Telepon	Rp.	0,00
• Beban Tagihan Air	Rp.	2.260.000,00
• Beban Tagihan Listrik	Rp.	165.047.036,00
• Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp.	29.850.000,00
• Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp.	1.066.494.842,00
• Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp.	11.669.000,00
• Beban Paket/Pengiriman	Rp.	48.000,00
• Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	4.229.279,00
• Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	5.286.601,00
• Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp.	0,00
• Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Rp.	0,00
• Beban Sewa Mebel	Rp.	0,00
• Beban Sewa Peralatan Studio Audio	Rp.	0,00
• Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp.	10.500.000,00
• Beban Sewa Bangunan Terbuka	Rp.	8.500.000,00
• Beban Sewa Alat Musik	Rp.	0,00
• Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Rp.	0,00
• Beban Bimbingan Teknis	Rp.	215.000.000,00

5.2.5 Beban Pemeliharaan Rp 505.333.677,00

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu

➤ Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	404.915.305,00
➤ Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	99.668.372,00
➤ Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	750.000,00
JUMLAH	Rp	505.333.677,00

5.2.6 Beban Perjalanan Dinas Rp 4.643.411.402,00

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

➤ Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp	922.795.238,00
➤ Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	3.720.616.164,00
JUMLAH	Rp	4.643.411.402,00

5.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 899.597.188,00

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

➤ Beban penyusutan peralatan dan mesin	Rp	682.442.030,00
➤ Beban penyusutan gedung dan bangunan	Rp	217.155.158,00
➤ Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya - Buku	Rp	0,00
➤ Beban Amortisasi Aset tak berwujud	Rp	0,00
JUMLAH	Rp	899.597.188,00

5.2.8 Beban Lain-lain **Rp 1.259.325.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

➤ Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	39.250.000,00
➤ Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	1.220.075.000,00
JUMLAH	Rp	1.259.325.000,00

5.2.9 Beban Hibah **Rp 180.810.000,00**

Realisasi Beban Hibah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 180.810.000,00 yang berasal dari belanja Modal peralatan dan mesin berupa Alat Kedokteran Keluarga Berencana yang diserahkan kepada pihak ketiga.

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1 Ekuitas Awal **Rp 8.064.840.221,51**

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang dijadikan sebagai total ekuitas awal untuk tahun anggaran 2023.

5.3.2 Kenaikan/ Penurunan Ekuitas **Rp 163.859.753,75**

Jumlah tersebut merupakan nilai yang mempengaruhi turunnya ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember 2023. Hal ini dipengaruhi oleh Surplus Defisit LO sebesar Rp. (19.928.374.312,25), RK-PPKD sebesar Rp. 19.564.734.066,00, RK untuk Penerimaan Aktiva Tetap/Aset Tetap SKPD Rp. 710.227.800,00, RK untuk Penyerahan Aktiva Tetap/Aset Tetap SKPD (629.137.272,57) dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 446.409.472,57.

5.3.3 Ekuitas Akhir **Rp** **8.228.699.975,26**

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember Tahun 2023.

5.4 Neraca

5.4.1 Kas di Bendaharawan Penerimaan **Rp** **0.00**

Akun ini untuk menunjukkan saldo kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendaharawan Penerimaan SKPD yang bersumber dari pengelolaan pendapatan asli daerah per tanggal 31 Desember Tahun 2023. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk sebagai salah satu SKPD yang mengelola PAD.

5.4.2 Kas di Bendaharawan Pengeluaran **Rp** **0,00**

Jumlah ini merupakan saldo kas per tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang menjadi tanggung jawab pengelolaan Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang berasal dari sisa *dropping* Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bengkalis setelah dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 .

5.4.3 Piutang Pajak Daerah **Rp** **0.00**

Akun ini menunjukkan saldo Piutang Pajak Daerah yang sudah ada ketetapannya, namun sampai dengan tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 belum dibayar oleh wajib pajak/wajib setor. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk sebagai salah satu SKPD yang mengelola pajak daerah.

5.4.4 Piutang Retribusi Daerah **Rp** **0.00**

Akun ini untuk menunjukkan saldo Piutang Retribusi Daerah yang sudah ada ketetapannya, namun sampai dengan tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 belum dibayar oleh wajib pajak/wajib setor. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk sebagai salah satu SKPD yang mengelola retribusi daerah.

5.4.5 Panjar / Uang Muka **Rp** **0.00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah panjar/uang muka yang diberikan oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD kepada para PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis maupun pihak ketiga lainnya Per 31 Desember 2023.

Panjar tersebut dipergunakan untuk membiayai terlebih dahulu pelaksanaan kegiatan ataupun pembayaran lainnya dan akan dipertanggungjawabkan pada saat panjar tersebut dipergunakan untuk merealisasikan belanja yang telah dianggarkan.

5.4.6 Persediaan **Rp** **71.505.990,00**

Akun ini menunjukkan saldo persediaan per tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang berada dalam pengelolaan Bendaharawan Barang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (First In First Out).

Akun ini akan menunjukkan saldo persediaan per tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yang berada dalam pengelolaan Pengurus Barang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saldo Persediaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.1
Saldo Persediaan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Persediaan	Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 (Rp.)
1.	Alat Tulis Kantor	325.200,00
2.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	445.000,00
3.	Bahan Cetak	239.500,00
4.	Benda Pos	0,00
5.	Alat Listrik	800.900,00
6.	Bahan Lainnya	0,00
7.	Obat/Kontrasepsi	69.695.390,00

Rincian Persediaan sebesar Rp. 71.505.990,00 tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran III**.

5.4.7 Aset Tetap **Rp 15.051.234.638,40**

Akun ini menunjukkan jumlah Aset Tetap (sebelum penyusutan) yang tercatat dan dikelola langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp. 15.051.234.638,40 yang seluruhnya Aset Tetap Rampung yang siap/telah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

➤ Tanah	Rp	373.525.000,00
➤ Peralatan dan Mesin	Rp	7.317.955.762,55
➤ Gedung dan Bangunan	Rp	7.324.534.075,85
➤ Jalan, Irigasi, dan Instalasi	Rp	0,00
➤ Aset Tetap Lainnya	Rp	35.219.800,00
Jumlah Aset Tetap	Rp	15.051.234.638,40

Secara ringkas saldo aset tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.051.234.638,40 sebagaimana disajikan pada **Tabel V.2** dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

Tabel V.2

Rincian Aset Tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

No.	Kelompok Aset Tetap	Saldo per 01-01-2023 (Rp)	Mutasi Aset Tetap 2023		Saldo per 31-12-2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1.	Tanah	373.525.000,00	0,00	0,00	373.525.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	6.645.269.815,12	1.301.823.220,00	629.137.272,57	7.317.955.762,55
3.	Gedung dan Bangunan	7.324.534.075,85	0,00	0,00	7.324.534.075,85
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	35.219.800,00	0,00	0,00	35.219.800,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		14.378.548.690,97	672.685.947,43	(0,00)	15.051.234.638,40

Dari **Tabel V.2** di atas, nilai aset per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 15.051.234.638,40 adalah jumlah dari nilai aset (sebelum penyusutan) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **672.685.947,43** sebesar berikut:

- Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp. 751.685.830,00 yang diakui menjadi Aset sebesar **Rp. 543.566.830,00**, Belanja modal aset tetap lainnya masuk kategori peralatan mesin **Rp. 48.028.590,00**.
- Transfer Masuk/dropping dari SKPD Lainnya sebesar Rp. 710.227.800,00 berupa Mobil Toyota Innova Venturer Rp. 527.500.000,00, 1 unit sepeda Motor merk Honda Supra X 125 CW Helm In Injection Rp. 16.737.800,00, Serta 1 Unit mobil RUSH 1,5S F700RE GMM-FJ BM 1658 D sebesar Rp. 165.990.000,00 Rincian aset dropping dan Berita Acara dapat dilihat pada **Lampiran IX**.
- Transfer keluar ke SKPD lainnya yang mengurangi Jumlah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 629.137.272,57, berupa 2 unit Mobil Nissan Livina 1r8 Ultimate AiT / BM 1190 DP sebesar Rp. 273.226.800,00 dan Mobil NISSAN X. TRAIL 2.0 cvT (4x2) AIT/ BM 1523 D sebesar Rp. 355.910.472,57, Rincian aset

Diserahkan Ke SKPD Lain dan Berita Acara dapat dilihat pada **Lampiran X**.

Rincian selengkapnya mutasi Aset Tetap tersebut dapat dilihat pada **Lampiran IV** untuk mutasi Aset Tetap rampung dan Rincian Aset serta Perhitungan Harga Perolehan.

5.4.8 Akumulasi Penyusutan **Rp. (6.882.220.988,14)**

Jumlah Akumulasi penyusutan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	31 Desember 2023
▶ Peralatan Mesin	(5.369.504.397,14)
▶ Gedung dan bangunan	(1.512.716.591,00)
▶ Jalan, Irigasi, dan Instalasi	(0,00)
▶ Aset Tetap Lainnya	(0,00)
JUMLAH	(6.882.220.988,14)

Penghitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran V**.

5.4.9 Aset Lainnya **Rp 39.500.000,00**

Jumlah asset lainnya sebesar Rp. 39.500.000,00 dari pembelian website yang pengadaannya pada bulan November 2018.

Rincian Rekapitulasi mutasi Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran VI**.

5.4.10 Amortisasi Aset Lainnya **Rp (39.500.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan amortisasi dari aset tak berwujud yang pengadaannya pada bulan November 2018. Rincian Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

5.4.11 Perhitungan Pihak Ketiga (FPK) **Rp 0.00**

Jumlah tersebut merupakan utang yang timbul atas pajak-pajak yang telah dipungut oleh Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah

satu Wajib Pungut (WAPU) atas transaksi pengeluaran yang terjadi, namun sampai dengan tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah/Negara. Sesuai ketentuan, penyetoran tersebut akan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5.4.12 Utang kepada Pihak Ketiga **Rp** **0.00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis kepada rekanan/penyedia barang atau jasa per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 . Kewajiban tersebut timbul karena adanya prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh SKPD tetapi SKPD belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada rekanan yang bersangkutan.

5.4.13 Utang Jangka Pendek **Rp** **11.819.665,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah kewajiban/hutang jangka pendek lainnya yang harus dibayar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis kepada pegawai atau pihak lainnya per 31 Desember Tahun Anggaran 2023, antara lain:

▶ Utang telepon	Rp	0,00
▶ Utang air	Rp	142.500,00
▶ Utang Listrik	Rp	10.624.865,00
▶ Utang Fax/Internet	Rp	1.052.300,00
JUMLAH	Rp	11.819.665,00

Adapun rincian dan Bukti Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **VIII**.

5.4.14 Ekuitas **Rp** **8.228.699.975,26**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.



BAB VI
PENGUNGKAPAN INFORMASI
LAINNYA

Beberapa hal lain yang perlu diungkap dalam penyusunan Laporan Keuangan Un Audit Per 31 Desember 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Per 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) Status dan kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Beberapa informasi lain yang berkaitan dengan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
- b) Sesuai dengan Peraturan Daerah di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan ini telah sejalan dengan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 jo. No. 21 Tahun 2011 yaitu sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yakni **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar; point h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

- c) Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu maka tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut :
- ☞ Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
 - ☞ Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
 - ☞ Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
 - ☞ Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
 - ☞ Pemantuan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
 - ☞ Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan
 - ☞ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
- e) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu terdiri dari:
- ☞ Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - ☞ Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;

- ☞ Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- f) Adapun susunan organisasi terdiri dari:
- ☞ Kepala;
 - ☞ Sekretaris;
 - ☞ Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - ☞ Bidang Keluarga Berencana
 - ☞ Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - ☞ Unit Pelaksana Teknis
 - ☞ Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Tempat kedudukan/domisili Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bertempat di Jl. Hang Tuah No.08 – Bengkalis.
- h) Terhitung sejak tanggal 30 Maret 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh **HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas menggantikan kedudukan oleh **IMAM SUBCHI, SKM, M.Si** berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor: Kpts. 821.22/BKPP/01/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- 2) Penyusunan kebijakan akuntansi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dalam proses sosialisasi.**

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester & Prognosis Per 31 Desember 2023 ini sebagian besar masih mengacu dan berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buletin Teknis SAP dan praktik-praktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kondisi ini dikarenakan pedoman kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih dalam proses sosialisasi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis akan segera menerapkannya setelah kebijakan akuntansi

tersebut selesai disusun dan ditetapkan secara formal melalui Peraturan Kepala Daerah.

3) Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap

Penyajian nilai Aset Tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan Un Audit Per 31 Desember 2023 merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

4) Pemberlakuan SOTK baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.

BAB VII PENUTUP

Sebagai bagian terakhir dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 📖 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.
- 📖 Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD untuk pengelolaan urusan wajib otonomi daerah; pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah; perangkat daerah; kepegawaian dan urusan wajib persandiaan
- 📖 Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 yang dialokasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.
- 📖 Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah merencanakan untuk melaksanakan 4 (Empat) Program, 16 Sub Program dan 53 (Lima Puluh Tiga) Kegiatan dengan anggaran Belanja yang tersedia sebesar Rp. 20.889.023.010,00. Hingga akhir tahun 31 Desember tahun anggaran 2023, Hingga akhir tahun 31 Desember tahun anggaran 2023, belanja yang telah terealisasi sebesar Rp. 19.564.734.066,00 atau mencapai 93,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 20.889.023.010,00 dengan capaian kinerja fisik (output) sebesar 99,51%.
- 📖 Secara umum program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bengkalis sampai dengan akhir tahun

2023 dapat dicapai dengan capaian atas target kinerja tersebut mencapai 93,66%.

- 📖 Realisasi Defisit per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (19.564.734.066,00) yang berarti mencapai 93,66% dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 sebesar minus Rp. (20.889.023.010,00)
- 📖 Seluruh capaian kinerja sebagaimana yang disimpulkan di atas menunjukkan adanya komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan segenap staf dan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, di samping adanya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (*KISS*) dengan berbagai pihak terkait maupun adanya partisipasi dari segenap lapisan unsur masyarakat.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yakni APBD), sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna, Oleh karena saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya di masa mendatang.

Bengkalis, Februari 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran APBD -P				Realisasi				Perbandingan Anggaran & Realisasi (%) (11)=(10/6)*100	Capaian Kinerja (%) (12)
		B. Pegawai	B. Barang & Jasa	B. Modal	Jumlah	B. Pegawai	B. Barang & Jasa	B. Modal	Jumlah		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3 +4+5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7+8+9)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	6.330.233.830,00	4.191.395.820,00	673.038.000,00	11.194.667.650,00	5.867.250.343,00	4.018.881.425,00	618.904.420,00	10.505.036.188,00	93,84	96,75
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	96.600.000,00	0,00	96.600.000,00	0,00	96.600.000,00	0,00	96.600.000,00	100,00	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		96.600.000,00		96.600.000,00		96.600.000,00		96.600.000,00	100,00	100,00
II	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	6.330.233.830,00	0,00	0,00	6.330.233.830,00	5.867.250.343,00	0,00	0,00	5.867.250.343,00	92,69	94,00
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.330.233.830,00			6.330.233.830,00	5.867.250.343,00			5.867.250.343,00	92,69	94,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		672.000.000,00	0,00	672.000.000,00	0,00	672.000.000,00	0,00	672.000.000,00	100,00	100,00
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		672.000.000,00		672.000.000,00		672.000.000,00		672.000.000,00	100,00	100,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	345.483.000,00	0,00	345.483.000,00	0,00	344.933.540,00	0,00	344.933.540,00	99,84	100,00
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya		50.809.000,00		50.809.000,00		50.609.340,00		50.609.340,00	99,61	100,00
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		294.674.000,00		294.674.000,00		294.324.200,00		294.324.200,00	99,88	100,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	1.787.566.500,00	29.978.000,00	1.817.544.500,00	0,00	1.721.977.414,00	27.309.000,00	1.749.286.414,00	96,24	96,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		57.481.800,00		57.481.800,00		57.476.800,00		57.476.800,00	99,99	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		120.908.900,00		120.908.900,00		120.708.900,00		120.708.900,00	99,83	100,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			29.978.000,00	29.978.000,00			27.309.000,00	27.309.000,00	91,10	92,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		206.900.000,00		206.900.000,00		206.900.000,00		206.900.000,00	100,00	100,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		250.000.800,00		250.000.800,00		187.011.100,00		187.011.100,00	74,80	76,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		30.000.000,00		30.000.000,00		29.850.000,00		29.850.000,00	99,50	100,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		876.525.000,00		876.525.000,00		876.490.614,00		876.490.614,00	100,00	100,00
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		245.750.000,00		245.750.000,00		243.540.000,00		243.540.000,00	99,10	100,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000,00	643.060.000,00	644.060.000,00	0,00	0,00	591.595.420,00	591.595.420,00	91,85	97,00
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			38.260.000,00	38.260.000,00		0,00	37.590.000,00	37.590.000,00	98,25	99,00
15	Pengadaan Mebel			99.851.000,00	99.851.000,00		0,00	99.525.930,00	99.525.930,00	99,67	100,00
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.000.000,00	504.949.000,00	505.949.000,00			454.479.490,00	454.479.490,00	89,83	92,00

VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		548.046.320,00	0,00	548.046.320,00	0,00	464.026.794,00	0,00	464.026.794,00	84,67	89,00
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		187.200.000,00		187.200.000,00		187.048.000,00		187.048.000,00	99,92	100,00
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		249.802.000,00		249.802.000,00		171.462.914,00		171.462.914,00	68,64	70,00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		111.044.320,00		111.044.320,00		105.515.880,00		105.515.880,00	95,02	97,00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		740.700.000,00	0,00	740.700.000,00	0,00	719.343.677,00	0,00	719.343.677,00	97,12	98,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		318.740.000,00		318.740.000,00		300.465.305,00		300.465.305,00	94,27	95,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		230.400.000,00		230.400.000,00		230.400.000,00		230.400.000,00	100,00	100,00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		191.560.000,00		191.560.000,00		188.478.372,00		188.478.372,00	98,39	99,00
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	433.677.400,00	0,00	433.677.400,00	0,00	420.750.843,00	0,00	420.750.843,00	97,02	98,50
IX	Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	185.530.500,00	0,00	185.530.500,00	0,00	175.898.543,00	0,00	175.898.543,00	94,81	98,00
23	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		30.668.300,00		30.668.300,00		30.600.743,00		30.600.743,00	99,78	100,00
24	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota		119.736.000,00	0,00	119.736.000,00		110.255.400,00	0,00	110.255.400,00	92,08	94,00
25	Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal dan Informal		35.126.200,00		35.126.200,00		35.042.400,00		35.042.400,00	99,76	100,00
X	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/ kota	0,00	248.146.900,00	0,00	248.146.900,00	0,00	244.852.300,00	0,00	244.852.300,00	98,67	99,00
26	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sistem informasi Keluarga		64.200.000,00	0,00	64.200.000,00		62.535.000,00	0,00	62.535.000,00	97,41	98,00
27	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		102.600.000,00	0,00	102.600.000,00		102.600.000,00	0,00	102.600.000,00	100,00	100,00
28	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		81.346.900,00		81.346.900,00		79.717.300,00		79.717.300,00	98,00	99,00
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	5.853.939.660,00	260.750.000,00	6.114.689.660,00	0,00	5.482.865.722,00	181.560.000,00	5.664.425.722,00	92,64	87,41
XI	Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	718.500.000,00	0,00	718.500.000,00	0,00	705.500.000,00	0,00	705.500.000,00	98,19	99,40
29	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		80.000.000,00	0,00	80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	100,00	100,00
30	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		150.000.000,00		150.000.000,00		149.500.000,00		149.500.000,00	99,67	100,00

31	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mimi Lokakarya (Mimilok)	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	142.100.000,00	142.100.000,00	99,37	100,00
32	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00	253.900.000,00	253.900.000,00	95,63	97,00
33	Pengendalian Program KKBP	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100,00
XII	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB(PKB/PLKB)	2.559.918.200,00	2.559.918.200,00	0,00	2.466.163.974,00	2.466.163.974,00	96,34	97,33
34	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan olah PKB/PLKB	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00	302.000.000,00	302.000.000,00	100,00	100,00
35	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.730.475.800,00	1.730.475.800,00	0,00	1.675.606.200,00	1.675.606.200,00	96,83	98,00
36	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	527.442.400,00	527.442.400,00	0,00	488.557.774,00	488.557.774,00	92,63	94,00
XIII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/kota	2.040.703.660,00	2.040.703.660,00	0,00	1.832.935.348,00	1.832.935.348,00	87,53	89,57
37	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	192.150.160,00	192.150.160,00	750.000,00	177.456.450,00	178.206.450,00	92,38	94,00
38	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.498.281.000,00	1.498.281.000,00	0,00	1.320.547.398,00	1.320.547.398,00	88,14	86,00
39	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	3.290.000,00	3.290.000,00	260.000.000,00	3.140.000,00	180.810.000,00	69,87	72,00
40	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	53.673.000,00	53.673.000,00	0,00	44.193.000,00	44.193.000,00	82,34	84,00
41	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	40.733.500,00	40.733.500,00	0,00	37.493.500,00	37.493.500,00	92,05	93,00
42	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	26.241.000,00	26.241.000,00	0,00	25.100.000,00	25.100.000,00	95,65	98,00
43	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	226.335.000,00	226.335.000,00	0,00	225.005.000,00	225.005.000,00	99,41	100,00
XIV	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	534.817.800,00	534.817.800,00	0,00	478.266.400,00	478.266.400,00	89,43	63,33
44	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pelaksanaan Terpadu Kampung KB	418.500.000,00	418.500.000,00	0,00	371.235.000,00	371.235.000,00	88,71	90,00

46	Pembinaan Terpadu Kampung KB		107.317.800,00		107.317.800,00		107.031.400,00		107.031.400,00	99,73	100,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	3.145.988.300,00	0,00	3.145.988.300,00	0,00	2.974.521.313,00	0,00	2.974.521.313,00	94,55	173,67
XV	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	3.029.629.900,00	0,00	3.029.629.900,00	0,00	2.883.973.903,00	0,00	2.883.973.903,00	95,19	93,67
47	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		413.078.000,00		413.078.000,00		284.312.100,00		284.312.100,00	68,83	72,00
48	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		41.163.100,00		41.163.100,00		39.222.000,00		39.222.000,00	95,28	98,00
49	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		2.156.630.000,00		2.156.630.000,00		2.155.991.992,00		2.155.991.992,00	99,97	100,00
50	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		115.360.000,00		115.360.000,00		114.629.800,00		114.629.800,00	99,37	100,00
51	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		177.398.800,00		177.398.800,00		175.363.011,00		175.363.011,00	98,85	99,00
52	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		126.000.000,00		126.000.000,00		114.455.000,00		114.455.000,00	90,84	93,00
XVI	Pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah KAB/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	116.358.400,00	0,00	116.358.400,00	0,00	90.547.410,00	0,00	90.547.410,00	77,82	80,00
53	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		116.358.400,00		116.358.400,00		90.547.410,00		90.547.410,00	77,82	80,00
J U M L A H		6.330.233.830,00	13.625.001.180,00	933.788.000,00	20.889.023.010,00	5.867.250.343,00	12.897.019.303,00	800.464.420,00	19.564.734.066,00	93,66	99,51

Bengkalis, Desember 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS



H. HAMBALLI, S.Pd.I
PEMBINA TK I
NIP. 19670305 198811 1 001

PERHITUNGAN ALAT KONTRASEPSI DARI BKKBN PROVINSI RIAU

Per 30 Juni 2023

NO	Tgl	Nama Barang	Banyaknya	Satuan	Harga	TOTAL
1	20 January 2023	Implant 2 btg	100	SET	157.485,00	15.748.500,00
		Suntik Progestin	5000	VIAL	4.800,00	24.000.000,00
		Pil Kombinasi	1100	SIKLUS	1.153,00	1.268.300,00
		Pil Kombinasi	1600	SIKLUS	1.153,00	1.844.800,00
		Pil Kombinasi	300	SIKLUS	1.153,00	345.900,00
		Asam Mefanamat 500 mg, Tablet	250	STRIP	1.110,00	277.500,00
		syringe , 3 ml (Implant)	700	BUAH	1.099,00	769.300,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	100	BUAH	891,00	89.100,00
		PLaster Steril	100	BUAH	4.212,00	421.200,00
		Sarung tangan steril	50	PSG	6.780,00	339.000,00
		Masker (Face mask)	100	BUAH	860,00	86.000,00
		Alcohol Swab 2-ply	100	BUAH	116,00	11.600,00
		Amoksisilin 500 mg Tablet	2500	BUAH	211,00	527.500,00
		JUMLAH				45.728.700,00
2	29 March 2023	Implant 2 btg	700	SET	157.485,00	110.239.500,00
		IUD Copper T	50	BUAH	12.500,00	625.000,00
		Asam Mefanamat 500 mg, Tablet	570	STRIP	1.110,00	632.700,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	700	BUAH	891,00	623.700,00
		Plaster Steril	700	BUAH	4.423,00	3.096.100,00
		Doek Steril Disposable	600	BUAH	6.863,00	4.117.800,00
		Sarung tangan steril	700	PSG	6.600,00	4.620.000,00
		Masker (Face mask)	650	BUAH	860,00	559.000,00
		Povidone Iodine, 30 ml	117	BUAH	4.551,00	532.467,00
		Alcohol Swab 2-ply	700	BUAH	116,00	81.200,00
		Amoksisilin 500 mg Tablet	5700	BUAH	211,00	1.202.700,00
		JUMLAH				126.330.167,00
4	10 June 2022	IUD Copper T	300	BUAH	12.500	3.750.000,00
		Implant 2 btg	800	SET	157.485	125.988.000,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	800	BUAH	1.259	1.007.200,00
		Masker (Face mask)	800	BUAH	900	720.000,00
		Sarung tangan steril	800	PSG	8.500	6.800.000,00
		Plester Steril	800	BUAH	4.212	3.369.600,00
		Povidone Iodine, 30 ml	160	BUAH	4.551	728.160,00
		Alcohol Swab 2-ply	800	BUAH	116	92.800,00
		Amoksisilin 500 mg Tablet	4000	BUAH	211	844.000,00
		Safety Box	8	KOTAK	12.450	99.600,00
		syringe , 3 ml (Implant)	800	BUAH	800	640.000,00
		Doek Steril Disposable	800	KOTAK	6.300	5.040.000,00
		JUMLAH				149.079.360,00
TOTAL SEMESTER I						321.138.227,00
TOTAL						321.138.227,00

PERHITUNGAN ALAT KONTRASEPSI DARI BKKBN PROVINSI RIAU

Per 31 Desember 2023

NO	Tgl	Nama Barang	Banyaknya	Satuan	Harga	TOTAL
1	11 August 2023	Implant 2 btg	800	SET	157.485,00	125.988.000,00
		IUD Copper T	200	BUAH	12.614,00	2.522.800,00
		Pil Kombinasi	3000	SIKLUS	1.153,00	3.459.000,00
		Pil Progestin	2000	SIKLUS	4.017,00	8.034.000,00
		suntik Progestin	3000	VIAL	4.820,00	14.460.000,00
		Suntik Kombinasi	1000	VIAL	11.590,00	11.590.000,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	800	BUAH	1.259,00	1.007.200,00
		Masker (Face mask)	800	BUAH	900,00	720.000,00
		Sarung tangan steril	800	BUAH	8.500,00	6.800.000,00
		PLaster Steril Dermafix	800	BUAH	3.751,00	3.000.800,00
		Alcohol Swab 2-ply	800	BUAH	126,00	100.800,00
		Asam Mefanamat 500 mg, Tablet	800	STRIP	4.440,00	3.552.000,00
		syringe , 3 ml (Implant)	5000	BUAH	1.500,00	7.500.000,00
		Povidone Iodine, 30 ml	160	BUAH	4.551,00	728.160,00
		Doek Steril Disposable	700	BUAH	6.300,00	4.410.000,00
		JUMLAH				193.872.760,00
2	17 October 2023	Implant 2 btg	800	SET	157.485,00	125.988.000,00
		IUD	200	BUAH	12.614,00	2.522.800,00
		suntik Progestin	5000	VIAL	4.820,00	24.100.000,00
		Kondom	100	Gross	125.759,00	12.575.900,00
		Pil Progestin	1000	SIKLUS	4.017,00	4.017.000,00
		syringe , 3 ml (Implant)	5000	BUAH	1.500,00	7.500.000,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	800	BUAH	1.259,00	1.007.200,00
		PLaster Steril Dermafix	70	BUAH	3.751,00	262.570,00
		PLaster Steril Dermafix	670	PSG	3.751,00	2.513.170,00
		Doek Steril Disposable	800	BUAH	6.300,00	5.040.000,00
		Sarung tangan steril	800	BUAH	8.500,00	6.800.000,00
		Masker (Face mask)	800	BUAH	900,00	720.000,00
		Povidone Iodine, 30 ml	53	BUAH	4.551,00	241.203,00
		Safety Box	5	BUAH	13.950,00	69.750,00
		Alcohol Swab 2-ply	800	BUAH	126,00	100.800,00
		Asam Mefanamat 500 mg, Tablet	800	STRIP	4.440,00	3.552.000,00
		JUMLAH				197.010.393,00
TOTAL SEMESTER II						390.883.153,00
TOTAL						

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 010/SBBK/DAR-KBKR/I/2023

TANGGAL : 20/01/2023

KEPADA : *gudang dppkb bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 009/SPMB/DAR-KBKR/I/2023 TANGGAL : 20/01/2023
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	JL. ML. AH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TIPIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	TIPIK STOK REALISASI TERKINI
				NOMOR BE-15	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1 ✓	Implan 2 Batang	100	Set	2G030250	31.08.2027	157.485,00	15.748.500,00	APBN		
2 ✓	Suntik Progestin	5.000	Vial	1500128	28.02/2027	4.800,00	24.000.000,00	APBN		
3 ✓	Pil Kombinasi	1.100	Siklus	0193115	28/09/2025	1.153,00	1.268.300,00	APBN		
4 ✓	Pil Kombinasi	1.600	Siklus	0193133	12/10/2025	1.153,00	1.844.800,00	APBN		
5 ✓	Pil Kombinasi	300	Siklus	0193121	20/10/2025	1.153,00	345.900,00	APBN		
6 ✓	Asam mefenamat. 500 mg	250	Strip	TMECB20046	31.07/2024	1.110,00	277.500,00	APBN		
7 ✓	Syringe 3 ml	700	Buah	19092288	31.08/2027	1.099,00	769.300,00	APBN		
8 ✓	Lidocaine. 2 persen. Injeksi. ampul	100	Buah	5636204699	23.06/2026	891,00	89.100,00	APBN		
9 ✓	Plester steril	100	Buah	01042088	31.03/2025	4.212,00	421.200,00	APBN		
10 ✓	Sarang tangan steril	50	Pasang	21090306	30.06/2026	6.780,00	339.000,00	APBN		
11 ✓	Masker (face mask)	100	Buah	210824-008-5	23.08/2024	860,00	86.000,00	APBN		
12 ✓	Alcohol swab 2-ply	100	Buah	190430	31.03.2024	116,00	11.600,00	APBN		
13 ✓	Amoksisilin. 500 mg. Tablet	2.500	Buah	TAMXB23682	31.10/2024	211,00	527.500,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							45.728.700,00			

.....
Yang mengeluarkan
Bendahara Materiil



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

.....
Yang mengangkut
Mengambil /mengantar



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang menerima



.....
Nama: ADLIKASTUTI
Pangkat: PENATA (III/C)
NIP 19750424 200212 2 004

Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 885 / SP03.06/J1/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023) di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arselan Syarif, SE
Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III.d
NIP : 19840720 201012 1 002
Jabatan : Sub Koordinator Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Alamat : Jalan Terubuk No.01 Wonorejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Aplikastuti
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
NIP : 19750424 200212 2 004
Jabatan : Pengurus Barang Gudang alat dan Obat Kontrasepsi
Alamat : Jalan Hangtuh No.. Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara berupa. Suntik Progestin, Pil Kombinasi, dan Implant 2 Batang beserta BMHP dengan nilai total sebesar **Rp.45.728.700,-** dengan rincian terlampir.

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

Subkoordinator Keuangan dan BMN
Perwakilan BKKBN Prov.Riau

Arselan Syarif, SE
NIP.19840720 201012 1 002

PIHAK KEDUA

Pengurus Barang Gudang Alat dan Obat kontrasepsi

Aplikastuti
NIP.19750424 200212 2 004

SAKSI-SAKSI

Bendahara Materil
Perwakilan BKKBN Prov.Riau

Andika Tri Saputra
NIP.19750105 200812 1 001

Bendahara Materil
DPPKB Kabupaten Bengkalis

Penata KKB Koordinator Distribusi Alatan
Siti Rogayah. SST
NIP. 46812071988032001

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA PEROLEHAN		KONDISI	KETERANGAN
				NILAI SATUAN	JUMLAH		
1	IMPLANT 2 BATANG	100	SET	157,485	15,748,500	Baik	
2	SUNTIKAN PROGESTIN	5,000	VIAL	4,800	24,000,000	Baik	
3	PIL KOMBINASI	1,100	SIKLUS	1,153	1,268,300	Baik	
4	PIL KOMBINASI	1,600	SIKLUS	1,153	1,844,800	Baik	
5	PIL KOMBINASI	300	SIKLUS	1,153	345,900	Baik	
6	ASAM MEFENAMAT 500 MG	250	STRIP	1,110	277,500	Baik	
7	SYRINGE 3 ML	700	BUAH	1,099	769,300	Baik	
8	LIDOCAINE 2 PERSEN, INJEKSI, AMPUL	100	AMPUL	891	89,100	Baik	
9	PLESTER STERIL	100	BUAH	4,212	421,200	Baik	
10	SARUNG TANGAN STERIL	50	BUAH	6,780	339,000	Baik	
11	MASKER (FACE MASK)	100	BUAH	860	86,000	Baik	
12	ALCOHOL SWAB 2 - PLY	100	BUAH	116	11,600	Baik	
13	AMOKSISILIN.500MG TABLET	2,500	BUAH	211	527,500	Baik	
Jumlah					45,728,700		

TANDA TERIMA

Kepada Yth :
Kepala OPD KB Kabupaten Bengkalis
di-

Tempat

NO.	NAMA BARANG	KODE	JUMLAH
1	Kartu Peserta KB	K/I/KB	1000 Lembar
2	Kartu Status Peserta KB	K/IV/KB	1000 Lembar
3	Informed Consent	-	1000 Lembar
4	Register Pelayanan KB	R/I/KB	50 Buku
5	Register Mutasi Alokasi	R/II/KB	50 Buku

Barang telah diterima dengan baik dan cukup oleh :

Nama : APLIKASTUTI

Jabatan

Tanggal : 21 FEBRUARI 2023

Tanda Tangan :



Pekanbaru, 13 Februari 2023
Pokja Datim


Ronal Inanda, S.Sos



Gudang BKKBN RIAU
 Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru 28125

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

TANGGAL : 29 03 2023

NOMOR : 018 SBBK/DAR-BKKBNRIAU/IV 2023

KEPADA : *gudang dppkb bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 018 SPMB/DAR-KBKR/1 2023 TANGGAL : 29 03 2023

METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	# MILAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TIPE PERMINTAAN DARURAT/REALOKASI/URKINSI	TIPE STOK REALOKASI/URKINSI
				NOMOR BIKS	BALAS KADALWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	Implan 2 Batang	700	Set	2K030330	29 02 2028	157.485,00	110.239.500,00	APBN		
2	IUD Coper T	50	Buah	DAS2374	31 01 2027	12.500,00	625.000,00	APBN		
3	Asam mefenamat. 500 mg	570	Strip	TMF0B20046	31 07 2024	1.110,00	632.700,00	APBN		
4	Lidocaine. 2 persen. Injeksi. ampul	700	Buah	5636204699	23 06 2026	891,00	623.700,00	APBN		
5	Plester steril	700	Buah	14082088	31 07 2025	4.423,00	3.096.100,00			
6	Doek Steril Disposable	600	Buah	19092288	31 08 2027	6.863,00	4.117.800,00	APBN		
7	Sarung tangan steril	700	Pasang	21090308	31 08 2026	6.600,00	4.620.000,00	APBN		
8	Masker (face mask)	650	Buah	210824-008-5	23 08 2024	860,00	559.000,00	APBN		
9	Povidone Iodine. 30 ml	117	Buah	16082288	31 07 2025	4.551,00	532.467,00	APBN		
10	Alcohol swab 2-ply	700	Buah	190430	31 03 2024	116,00	81.200,00	APBN		
11	Amoksisilin. 500 mg. Tablet	5.700	Buah	TAMXB23682	31 10 2024	211,00	1.202.700,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							126.330.167,00			

.....
Yang mengeluarkan
Bendahara Materiil



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

.....
Yang mengangkat
Mengambil mengantar

(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

.....
Yang menerima



Nama: APLIKASTUTI
Pangkat: PENATA (III/c)
NIP 19750424 200212 2 004

Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor : 1665/SP03.06/J1/2023

Pada hari ini Jum'at Tanggal Empat Belas Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-04-2023) di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arselan Syarif, SE
Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III.d
NIP : 19840720 201012 1 002
Jabatan : Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Alamat : Jalan Terubuk No.01 Wonorejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Aplikastuti
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
NIP : 19750424 200212 2 004
Jabatan : Pengurus Barang Gudang alat dan Obat Kontrasepsi
Alamat : Jalan Hangtuh No. Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara berupa. IUD Copper T dan Implant 2 Batang beserta BMHP dengan nilai total sebesar **Rp.126.330.167,-** dengan rincian terlampir.

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN
Perwakilan BKKBN Prov.Riau



Arselan Syarif, SE
NIP. 19840720 201012 1 002

Bendahara Materil
Perwakilan BKKBN Prov.Riau

Andika Tri Saputra
NIP.19750105 200812 1 001

PIHAK KEDUA

Pengurus Barang Gudang Alat dan Obat kontrasepsi



Aplikastuti
NIP. 19750424 200212 2 004

SAKSI-SAKSI

Bendahara Materil
DPPKB Kabupaten Bengkalis

Penata KKB Koordinator Distribusi Alat Kontrasepsi

Sih Rogayah, SST
NIP. 19681207 198803 2001

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA PEROLEHAN		KONDISI	KETERANGAN
				NILAI SATUAN	JUMLAH		
				157,485	110,239,500	Baik	
1	IMPLANT 2 BATANG	700	SET				
2	IUD COPPER T	50	BUAH	12,500	625,000	Baik	
3	ASAM MEFFENAMAT 500 MG	570	SIKLUS	1,110	632,700	Baik	
4	LIDOCAINE 2 PERSEN, INJEKSI, AMPUL	700	AMPUL	891	623,700	Baik	
5	PLESTER STERIL	700	BUAH	4,423	3,096,100	Baik	
6	DOEK STERIL DISPOSABLE	600	BUAH	6,863	4,117,800	Baik	
7	SARUNG TANGAN STERIL	700	BUAH	6,600	4,620,000	Baik	
8	MASKER (FACE MASK)	650	BUAH	860	559,000	Baik	
9	POVIDONE IODINE 30 ML	117	BUAH	4,551	532,467	Baik	
10	ALCOHOL SWAB 2 - PLY	700	BUAH	116	81,200	Baik	
11	AMOKSISILIN.500MG TABLET	5,700	BUAH	211	1,202,700	Baik	
Jumlah					126,330,167		



SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 036/SBBK/DAR-BKKBNRIAU/VI/2023

TANGGAL : 10/06/2023

KEPADA : *gudang_dppkb_bengkalis*
ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 036/SPMB/DAR-KBKR/VI/2023 TANGGAL : 10/06/2023
METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	TITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BETS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	IUD Coper T	✓ 300	Buah	DAS 2380	02/02/2027	12.500,00	3.750.000,00	APBN		
2	Implan 2 Batang	✓ 800	Set	3A030010	29/02/2028	157.485,00	125.988.000,00	APBN		
3	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	✓ 800	Buah	56362085-2	30/11/2026	1.259,00	1.007.200,00	APBN		
4	Masker (face mask)	✓ 800	Buah	SM23062101	31/01/2028	900,00	720.000,00	APBN		
5	Sarung tangan steril	✓ 800	Pasang	22104702	30/09/2027	8.500,00	6.800.000,00	APBN		
6	Plester steril	✓ 800	Buah	04022188	31/01/2026	4.212,00	3.369.600,00	APBN		
7	Povidone Iodine, 30 ml	✓ 160	Buah	02032388	28/02/2026	4.551,00	728.160,00	APBN		
8	Alcohol swab 2-ply	✓ 800	Buah	190430	31/03/2024	116,00	92.800,00	APBN		
9	Amoksisilin, 500 mg, Tablet	✓ 4.000	Buah	TAMXB23696	31/10/2024	211,00	844.000,00	APBN		
10	Safety Box	✓ 8	Kotak	2022	31/12/2050	12.450,00	99.600,00	APBN		
11	Syringe, 3 ml	✓ 800	Buah	10082288	31/07/2027	800,00	640.000,00	APBN		
12	Doek Steril Disposable	✓ 800	Buah	23010601	29/02/2028	6.300,00	5.040.000,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							149.079.360,00			

.....
Yang mengeluarkan
Bendahara Materiil



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

.....
Yang mengangkut
Mengambil /mengantar

(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang menerima



Nama: *Shahri Pangaya*
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 196812071988032001

Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 2685 / SP03.06/J1/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023) di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arselan Syarif, SE
- Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III.d
- NIP : 19840720 201012 1 002
- Jabatan : Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
- Alamat : Jalan Terubuk No.01 Wonorejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Aplikastuti
- Pangkat/Golongan : Penata / III.c
- NIP : 19750424 200212 2 004
- Jabatan : Pengurus Barang Gudang alat dan Obat Kontrasepsi
- Alamat : Jalan Hangtuh No.. Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara berupa. IUD Copper T dan Implan 2 Batang beserta BMHP dengan nilai total sebesar **Rp.149.079.360,-** dengan rincian terlampir.

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN
Perwakilan BKKBN Prov.Riau

Arselan Syarif, SE
NIP.19840720 201012 1 002

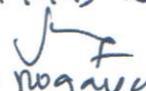
PIHAK KEDUA
Pengurus Barang Gudang Alat dan Obat kontrasepsi

Aplikastuti
NIP.19750424 200212 2 004

SAKSI-SAKSI

Bendahara Materil
Perwakilan BKKBN Prov.Riau

Andika Tri Saputra
NIP.19750105 200812 1 001

Bendahara Materil
DPPKB Kabupaten Bengkalis.
Penata KKB Koordinator Distribusi Alotekon.

Spt Nugayef SST
NIP.19681207 1988 03 2001

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA PEROLEHAN		KONDISI	KETERANGAN
				NILAI SATUAN	JUMLAH		
1	IUD COPPER T	300	BUAH	12,500	3,750,000	Baik	
2	IMPLANT 2 BATANG	800	SET	157,485	125,988,000		
3	LIDOCAINE 2 PERSEN, INJEKSI, AMPUL	800	AMPUL	1,259	1,007,200	Baik	
4	MASKER (FACE MASK)	800	BUAH	900	720,000	Baik	
5	SARUNG TANGAN STERIL	800	BUAH	8,500	6,800,000	Baik	
6	PLESTER STERIL	800	BUAH	4,212	3,369,600	Baik	
7	POVIDONE IODINE 30 ML	160	BUAH	4,551	728,160	Baik	
8	ALCOHOL SWAB 2 - PLY	800	BUAH	116	92,800	Baik	
9	AMOKSISILIN.500MG TABLET	4,000	BUAH	211	844,000	Baik	
10	SAFETY BOX	8	BUAH	12,450	99,600	Baik	
11	SYRINGE 3 ML	800	BUAH	800	640,000	Baik	
12	DOEK STERIL DISPOSABLE	800	BUAH	6,300	5,040,000	Baik	
Jumlah					149,079,360		



Gudang BKKBN RIAU
 Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru 28125

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

TANGGAL : 11/08/2023

NOMOR : 052/SBBK/DAR-BKKBNRIAU/VIII/2023

KEPADA : *gudang_dppkb_bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 051/SPMB/DAR-KBKR/VIII/2023 TANGGAL : 11/08/2023

METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	TITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BETS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1 ✓	Implan 2 Batang	800	Set	3A030020	29/02/2028	157.485,00	125.988.000,00	APBN		
2 ✓	IUD Coper T	200	Buah	DAV 2843	28/02/2030	12.614,00	2.522.800,00	APBN		
3 ✓	Pil Kombinasi	3.000	Siklus	3193091	30/04/2028	1.153,00	3.459.000,00	APBN		
4 ✓	Pil Progestin	2.000	Siklus	1146001	18/03/2025	4.017,00	8.034.000,00	APBN		
5 ✓	Suntik Progestin	3.000	Vial	3076108	03/05/2028	4.820,00	14.460.000,00	APBN		
6 ✓	Suntik Kombinasi	1.000	Vial	3131027	18/04/2026	11.590,00	11.590.000,00	APBN		
7 ✓	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	800	Buah	66362006-2	28/02/2027	1.259,00	1.007.200,00	APBN		
8	Masker (face mask)	800	Buah	SM23062101	31/01/2028	900,00	720.000,00	APBN		
9	Sarung tangan steril	800 <i>400</i>	Pasang	22104702	30/09/2027	8.500,00	6.800.000,00	APBN		
10 ✓	Plester Steril Dermafix	800	Buah	10042388.	31/03/2028	3.751,00	3.000.800,00	APBN		
11 ✓	Alcohol swab 2-ply	800	Buah	20040112	31/01/2026	126,00	100.800,00	APBN		
12 ✓	Asam Mefenamat, 500 mg	800	Strip	1940537	31/05/2028	4.440,00	3.552.000,00	APBN		
13	Syringe, 3 ml	5.000	Buah	23613	13/06/2028	1.500,00	7.500.000,00	APBN		

- 4000 stok

Blus

100 x

1000 x

1000 x

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TTIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	TTIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BETS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
14	Povidone Iodine, 30 ml	160	Buah	02032388	28/02/2026	4.551,00	728.160,00	APBN		
15	Doek Steril Disposable	700	Buah	23010601	29/02/2028	6.300,00	4.410.000,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							193.872.760,00			

Blm X

Yang mengeluarkan
Bendahara Materiil

Yang mengangkut
Mengambil /mengantar

Yang menerima



(Andika Tri Saputra)
NIP 19750105 200812 1 001



(Siti Nugayd)
NIP



Nama:

Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 3845/SP03.06/J1/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-08-2023) di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arselan Syarif, SE
Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III.d
NIP : 19840720 201012 1 002
Jabatan : Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Alamat : Jalan Terubuk No.01 Wonorejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Aplikastuti
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
NIP : 19750424 200212 2 004
Jabatan : Pengurus Barang Gudang alat dan Obat Kontrasepsi
Alamat : Jalan Hangtuah No.. Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara berupa. IUD Copper T, Pil Kombinasi, Pil Progestin, Suntik Progestin, Suntik Kombinasi dan Implant 2 Batang beserta BMHP dengan nilai total sebesar **Rp.193.872.760,-** dengan rincian terlampir.

Pasal 2

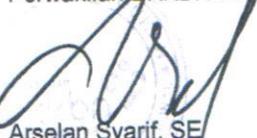
Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuatdalam 2 (dua) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN
Perwakilan BKKBN Prov.Riau


Arselan Syarif, SE
NIP.19840720 201012 1 002



PIHAK KEDUA

Pengurus Barang Gudang Alat dan Obat kontrasepsi

Aplikastuti
NIP. 19750424 200212 2 004

SAKSI-SAKSI

Bendahara Materil
Perwakilan BKKBN Prov.Riau


Andika Tri Saputra
NIP.19750105 200812 1 001

Bendahara Materil
DPPKB Kabupaten Bengkalis

.....
NIP.....

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA PEROLEHAN		KONDISI	KETERANGAN
				NILAI SATUAN	JUMLAH		
1	IMPLANT 2 BATANG	800	SET	157,485	125,988,000	Baik	
2	JUD COPPER T	200	BUAH	12,614	2,522,800	Baik	
3	PIL KOMBINASI	3,000	SIKLUS	1,153	3,459,000	Baik	
4	PIL PROGESTIN	2,000	SIKLUS	4,017	8,034,000	Baik	
5	SUNTIK KOMBINASI	1,000	VIAL	11,590	11,590,000	Baik	
6	SUNTIK PROGESTIN	3,000	VIAL	4,820	14,460,000	Baik	
7	LIDOCAINE 2 PERSEN, INJEKSI, AMPUL	800	AMPUL	1,259	1,007,200	Baik	
8	MASKER (FACE MASK)	800	BUAH	900	720,000	Baik	
9	SARUNG TANGAN STERIL	800	BUAH	8,500	6,800,000	Baik	
10	PLESTER STERIL DERMAFIX	800	BUAH	3,751	3,000,800	Baik	
11	ALCOHOL SWAB 2 - PLY	800	BUAH	126	100,800	Baik	
12	ASAM MEFENAMAT 500 MG	800	STRIP	4,440	3,552,000	Baik	
13	SYRINGE 3 ML	5,000	BUAH	1,500	7,500,000	Baik	
14	POVIDONE IODINE 30 ML	160	BUAH	4,551	728,160	Baik	
15	DOEK STERIL DISPOSABLE	700	BUAH	6,300	4,410,000	Baik	
Jumlah					193,872,760		



Gudang BKKBN RIAU
 Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru 28125

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

TANGGAL : 17/10/2023

NOMOR : 062/SBBK/DAR-BKKBNRIAU/X/2023

KEPADA : *gudang_dppkb_bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 059/SPMB/DAR-KBKR/X/2023 TANGGAL : 17/10/2023
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	TITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BETS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
✓ 1	Implan 2 Batang	800	Set	3A030020	29/02/2028	157.485,00	125.988.000,00	APBN		
✓ 2	IUD	200	Buah	DAV 2843	28/02/2030	12.614,00	2.522.800,00	APBN		
✓ 3	Suntik Progestin	5.000	Vial	3076109	03/05/2028	4.820,00	24.100.000,00	APBN		
✓ 4	Kondom	100	Gross	210431021	31/03/2026	125.759,00	12.575.900,00	APBN		
✓ 5	Pil Progestin	1.000	Siklus	1146001	18/03/2025	4.017,00	4.017.000,00	APBN		
✓ 6	Syringe, 3 ml	5.000	Buah	23613	13/06/2028	1.500,00	7.500.000,00	APBN		
✓ 7	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	800	Buah	66362006-4	28/02/2027	1.259,00	1.007.200,00	APBN		
✓ 8	Plester Steril Dermafix	70	Buah	10042388	31/03/2028	3.751,00	262.570,00	APBN		
✓ 9	Plester Steril Dermafix	670	Buah	17042388	31/03/2028	3.751,00	2.513.170,00	APBN		
✓ 10	Doek Steril Disposable	800	Buah	23010601	29/02/2028	6.300,00	5.040.000,00	APBN		
✓ 11	Sarung tangan steril	800	Pasang	22104702	30/09/2027	8.500,00	6.800.000,00	APBN		
✓ 12	Masker (face mask)	800	Buah	SM23062101	31/01/2028	900,00	720.000,00	APBN		
✓ 13	Povidone Iodine. 30 ml	53	Buah	02032388	28/02/2026	4.551,00	241.203,00	APBN		
✓ 14	Safety box	5	Buah	2022,	31/12/2050	13.950,00	69.750,00	APBN		

Handwritten notes:
 Handwritten: 17/10/2023
 Handwritten: 20/10/2023

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	TITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BETS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
✓ 15	Alcohol swab 2-ply ✓	800	Buah	20040112	31/01/2026	126,00	100.800,00	APBN		
✓ 16	Asam Mefenamat, 500 mg ✓	800	Strip	1940537	31/05/2028	4.440,00	3.552.000,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG								197.010.393,00		

Yang mengeluarkan
Bendahara Materiil



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang mengangkut
Mengambil /mengantar

(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur TK I (II/D)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang menerima



Nama: **APLIKASTUTI**
Pangkat: **Penata (III/c)**
NIP: **19750424 200212 2 009**

Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor : 5602/SP03.06/J1/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023) di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arselan Syarif, SE
Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III.d
NIP : 19840720 201012 1 002
Jabatan : Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Alamat : Jalan Terubuk No.01 Wonorejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Aplikastuti
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
NIP : 19750424 200212 2 004
Jabatan : Pengurus Barang Gudang alat dan Obat Kontrasepsi
Alamat : Jalan Hangtuh No.. Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara berupa. IUD Copper T, Suntik Progestin, Kondom, Pil Progestin, dan Implant 2 Batang beserta BMHP dengan nilai total sebesar **Rp.197.010.393,-** dengan rincian terlampir.

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

Ketua Tim Pokja Keuangan dan BMN
Perwakilan BKKBN/Prov.Riau



PIHAK KEDUA

Pengurus Barang Gudang Alat dan Obat kontrasepsi



SAKSI-SAKSI

Bendahara Materil
Perwakilan BKKBN Prov.Riau



Andika Tri Saputra
NIP.19750105 200812 1 001

Bendahara Materil
DPPKB Kabupaten Bengkalis

.....
NIP.....

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA PEROLEHAN		KONDISI	KETERANGAN
				NILAI SATUAN	JUMLAH		
1	IMPLANT 2 BATANG	800	SET	157,485	125,988,000	Baik	
2	IUD COPPER T	200	BUAH	12,614	2,522,800	Baik	
3	SUNTIK PROGESTIN	5,000	VIAL	4,820	24,100,000	Baik	
4	KONDOM	100	GROSS	125,759	12,575,900	Baik	
5	PIL PROGESTIN	1,000	SIKLUS	4,017	4,017,000	Baik	
6	SYRINGE 3 ML	5,000	BUAH	1,500	7,500,000	Baik	
7	LIDOCAINE 2 PERSEN, INJEKSI, AMPUL	800	AMPUL	1,259	1,007,200	Baik	
8	PLESTER STERIL DERMAFIX	70	BUAH	3,751	262,570	Baik	
9	PLESTER STERIL DERMAFIX	670	BUAH	3,751	2,513,170	Baik	
10	DOEK STERIL DISPOSABLE	800	BUAH	6,300	5,040,000	Baik	
11	SARUNG TANGAN STERIL	800	BUAH	8,500	6,800,000	Baik	
12	MASKER (FACE MASK)	800	BUAH	900	720,000	Baik	
13	POVIDONE IODINE 30 ML	53	BUAH	4,551	241,203	Baik	
14	SAFETY BOX	5	BUAH	13,950	69,750	Baik	
15	ALCOHOL SWAB 2 - PLY	800	BUAH	126	100,800	Baik	
16	ASAM MEFENAMAT 500 MG	800	SIKLUS	4,440	3,552,000	Baik	
Jumlah					197,010,393		

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG (STOK OPNAME)
PER 31 DESEMBER 2023

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
I. BELANJA ALAT TULIS KANTOR							
1		Buku Agenda	Pcs	1	60.000,00	60.000,00	
2		Gunting (Sedang)	Pcs	1	18.200,00	18.200,00	
3		Pensil Kayu (2b)	Pcs	2	8.500,00	17.000,00	
4		Stapler Hecter (anak no 10 Standar)	Kotak	1	9.200,00	9.200,00	
5		Kertas HVS A4 70 gr	Rim	1	100.000,00	100.000,00	
6		Kertas HVS F4 70 gr	Rim	1	111.000,00	111.000,00	
7		Kertas Memo (Stick Note)	Pak	1	9.800,00	9.800,00	
					Jumlah	325.200,00	
II. KEBERSIHAN							
1		Cairan Pembersih Lantai 900 ml	Botol	1	30.000,00	30.000,00	
2		Hand Sanitizer	Botol	1	75.000,00	75.000,00	
3		Isi Ulang Cair Karbon 780 ml	Botol	1	30.000,00	30.000,00	
4		Kemoceng Bulu Ayam Kualitas Sedang	Buah	1	81.000,00	81.000,00	
5		Pel Tangkai Sumbu	Buah	1	48.000,00	48.000,00	
6		Pengharum Ruangan Spray	Buah	1	51.000,00	51.000,00	
7		Refill Pembersih Lantai	Buah	2	22.000,00	44.000,00	
8		Sunlight Cair Isi Ulang	Buah	2	24.000,00	48.000,00	
9		Sapu Pelangi Type A	Buah	1	38.000,00	38.000,00	
					Jumlah	445.000,00	
III. KOMPONEN LISTRIK							
1		Lampu LED 18 watt	Buah	2	47.000,00	94.000,00	
2		Lampu 45 Watt	Buah	1	143.000,00	143.000,00	
3		Lampu LED 14 Watt	Buah	1	104.000,00	104.000,00	
4		Lampu LED 20 Watt	Buah	1	170.000,00	170.000,00	
5		Lampu LED 9 Watt	Buah	1	82.000,00	82.000,00	
6		Lampu LED AC/DC 10 Watt	Buah	1	158.000,00	158.000,00	
7		Lampu Lilin 23 Watt	Buah	1	49.900,00	49.900,00	
					Jumlah	800.900,00	
IV. CETAK DAN PENGGADAAN							
1		Cetak Map (Katon Buffalo)	Buah	15	6.300,00	94.500,00	
2		Cetak Kop Surat Dinas	Rim	1	145.000,00	145.000,00	
					Jumlah	239.500,00	
V. BELANJA METERAI							
1		Meterai 10000	Lembar	-	13.000,00	-	
VI. NON ALOKON/OBAT KONTRASEPSI							
1		Syringe 3 ml	Buah	1495	1.500,00	2.242.500,00	
2		Sarung Tangan Steril	Pasang	210	8.500,00	1.785.000,00	
3		Safety Box	Buah	6	12.450,00	74.700,00	
4		Safety Box	Buah	5	13.950,00	69.750,00	
5		Lidocain 2%	Buah	230	1.259,00	289.570,00	
6		Povidon Iodine 30 ml	Buah	105	4.551,00	477.855,00	
7		Plaster Steril Dermafix	Buah	165	3.751,00	618.915,00	
8		Masker (Fask Mask)	Buah	180	900,00	162.000,00	
9		Alchoh; Swab 2 Ply	Buah	245	126,00	30.870,00	
10		Doek Steril Disposable	Buah	270	6.300,00	1.701.000,00	
11		Asam Mefanamet 500 mg	Strip	185	4.440,00	821.400,00	
					Jumlah	8.273.560,00	
VII. NON ALOKON/OBAT KONTRASEPSI							
1		Amoxilin 500 mg	Kaplet	4800	650,00	3.120.000,00	
2		Asam Mefanimat 500 mg	Kaplet	1150	550,00	632.500,00	
3		Bisturi	Box	13	1.100,00	14.300,00	
4		Hanscoon Steril No 7	Box	115	6.600,00	759.000,00	
5		Hanscoon Steril No 7 1/2	Box	145	6.600,00	957.000,00	
6		Lidocain	Box	1470	3.620,00	5.321.400,00	
					Jumlah	10.804.200,00	
VIII. ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI							
		IUD Coper T	EACH	150	12.614,00	1.892.100,00	
1		Pil Kombinasi	CYCLE	1250	1.153,00	1.441.250,00	
2		Kondom	Gross	45	125.759,00	5.659.155,00	
3		Suntik Progestin	Vial	940	4.820,00	4.530.800,00	
4		Suntik Kombinasi	Vial	300	11.590,00	3.477.000,00	
5		Pil Progestin	CYCLE	900	4.017,00	3.615.300,00	
6		Pil Progestin	CYCLE	1000	4.017,00	4.017.000,00	
7		Implant 2 Batang	SET	165	157.485,00	25.985.025,00	
					Jumlah	50.617.630,00	
					Total	71.505.990,00	

PENGURUS BARANG
 PENGGUNA

YESMAR
 NIP. 19720830 200901 1003

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KAB. BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.i
 NIP. 19670305 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BENGKALIS
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP RAMPUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023

No.	Kelompok Aset Tetap	Saldo Awal 1 Januari 2023	Koreksi Hasil Inventarisasi		Saldo Awal Setelah Koreksi Hasil Inventarisasi	Mutasi tambah Tahun 2023			Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Keterangan
			Penambahan	Pengurangan		Transfer Masuk	Pembelian	Transfer Keluar		
	HAK PENGUASAAN SKPD:									
1	Tanah	373.525.000,00			373.525.000,00		0,00		373.525.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	6.645.269.815,12			6.645.269.815,12	710.227.800,00	591.595.420,00	629.137.272,57	7.317.955.762,55	
4	Gedung dan Bangunan	7.324.534.075,85			7.324.534.075,85		0,00		7.324.534.075,85	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00			0,00		0,00		0,00	
5	Aset Tetap Lainnya	35.219.800,00			35.219.800,00		0,00		35.219.800,00	
	SUB JUMLAH (1)	14.378.548.690,97	0,00	0,00	14.378.548.690,97	710.227.800,00	591.595.420,00	629.137.272,57	15.051.234.638,40	
	HAK PENGUASAAN PUBLIK:									
1	Tanah	0,00			0,00				0,00	
2	Peralatan dan Mesin	0,00			0,00				0,00	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00			0,00				0,00	
4	Gedung dan Bangunan	0,00			0,00				0,00	
5	Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00				0,00	
6	Aset Lainnya	0,00			0,00				0,00	
	SUB JUMLAH (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ASSET TETAP:									
1	Tanah	373.525.000,00		0,00	373.525.000,00	0,00	0,00		373.525.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	6.645.269.815,12		0,00	6.645.269.815,12	710.227.800,00	591.595.420,00	629.137.272,57	7.317.955.762,55	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00		0,00	7.324.534.075,85	0,00			7.324.534.075,85	
4	Gedung dan Bangunan	7.324.534.075,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aset Tetap Lainnya	35.219.800,00		0,00	35.219.800,00	0,00	0,00		35.219.800,00	
	JUMLAH (1 + 2)	14.378.548.690,97	0,00	0,00	14.378.548.690,97	710.227.800,00	591.595.420,00	629.137.272,57	15.051.234.638,40	

Bengkalis, Februari 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

H. HAMBALL, S.Pd.I
PEMBINA TK. I
NIP. 19670305 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-Desember-2023

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2023	NILAI BUKU
					Thn		Bulan	Semester I		
Aset Tetap				14.677.709.638,40						
2		PERALATAN DAN MESIN		7.317.955.762,55		4.687.062.367,14	348.800.950,00	333.641.080,00	5.369.504.397,14	1.948.451.365,41
1.3.2.1		ALAT BESAR								
1.3.2.1.3		ALAT BANTU		10.850.000,00		5.305.952,00	775.001,00	775.000,00	6.855.953,00	3.994.047,00
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN								
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		2.198.708.400,00		1.389.514.235,00	100.208.333,00	88.263.500,00	1.577.986.068,00	620.722.332,00
1.3.2.2.2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		550.000,00		550.000,00	-	-	550.000,00	-
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA								
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		1.532.173.166,24		1.128.486.151,80	82.274.596,00	60.343.347,00	1.271.104.094,80	261.069.071,44
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		1.284.408.547,70		848.577.221,72	68.890.990,00	61.995.650,00	979.463.861,72	304.944.685,98
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		586.156.856,90		483.188.705,00	10.845.370,00	18.170.690,00	512.204.765,00	73.952.091,90
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR								
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		115.785.840,00		11.944.670,00	4.949.220,00	6.054.116,00	22.948.006,00	92.837.834,00
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		3.500.000,00		3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	-
1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR		201.096.756,79		132.327.624,00	8.216.679,00	8.216.679,00	148.760.982,00	52.335.774,79
1.3.2.7		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN								
1.3.2.7.1		ALAT KEDOKTERAN		134.225.000,00		47.422.085,00	13.422.500,00	13.422.500,00	74.267.085,00	59.957.915,00
1.3.2.10		KOMPUTER								
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		889.762.195,64		379.730.983,62	48.587.472,00	65.478.506,00	493.796.961,62	395.965.234,02
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		360.738.999,28		256.514.739,00	10.630.789,00	10.921.092,00	278.066.620,00	82.672.379,28
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		7.324.534.075,85		1.295.561.433,00	108.577.579,00	108.577.579,00	1.512.716.591,00	5.811.817.484,85
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG								
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		7.236.659.775,85		1.274.813.330,00	107.113.007,00	107.113.007,00	1.489.039.344,00	5.747.620.431,85
1.3.3.3		BANGUNAN MENARA								
1.3.3.3.1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		87.874.300,00		20.748.103,00	1.464.572,00	1.464.572,00	23.677.247,00	64.197.053,00
5		ASET TETAP LAINNYA		35.219.800,00		-	-	-	-	35.219.800,00
1.3.5.1		BAHAN PERPUSTAKAAN								
1.3.5.1.1		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		35.219.800,00		-	-	-	-	35.219.800,00
		Jumlah Aset Tetap		14.677.709.638,40		5.982.623.800,14	457.378.529,00	442.218.659,00	6.882.220.988,14	7.795.488.650,26
		Jumlah		14.677.709.638,40		5.982.623.800,14	457.378.529,00	442.218.659,00	6.882.220.988,14	7.795.488.650,26



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI MUTASI ASET LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023

No.	Kelompok Aset Lainnya	Saldo Awal per 1 Januari 2023 (Rp)	Koreksi Hasil Inventarisasi		Saldo Awal Setelah Koreksi Hasil Inventarisasi	Mutasi Tambah Tahun 2023		Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
			Penambahan	Pengurangan		Transfer Masuk	Pembelian (Rp)		
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran				0,00		0,00	0,00	
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				0,00		0,00	0,00	
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				0,00		0,00	0,00	
4	Aset Tak Berwujud	39.500.000,00			39.500.000,00		-	39.500.000,00	
5	Aset Lain-lain -Reklas Aset 2013				0,00			0,00	
JUMLAH		39.500.000,00	-	-	39.500.000,00		-	39.500.000,00	

Bengkalis, Februari 2024
 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19670305 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AMORTISASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (Th)	Penyusutan						
						Dec-18	Des 2019	Des 2020	Dec-21	Jun-22	Dec-22	Akumulasi
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16
		Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id	1-Nov-18	39.500.000,00	4	1.645.833,33	9.875.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	4.937.500,00	3.291.666,67	39.500.000,00
TOTAL				39.500.000,00		1.645.833,33	9.875.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	4.937.500,00	3.291.666,67	39.500.000,00

NB : Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyusutan.

Bengkalis, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS**

H. HAMBALI, S.Pd.I
PEMBINA TK. I
NIP. 19670305 198811 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI UTANG JANGKA PENDEK BEBAN JASA BULAN DESEMBER
TAHUN 2023

No.	Jenis Belanja Jasa	No ID Pel	Jumlah (Rp.)	Keterangan
	Dec-22			Menjadi Utang Belanja untuk Tahun Anggaran Berikutnya Jumlah Tagihan dibayar Bulan Januari Tahun berikutnya Merupakan Beban Pascabayar
1	Telepon	0766-23644		
2	Air	11001502105	143.500,00	
3	Listrik	182300087068	9.984.143,00	
4	Internet	011-1519100806	1.007.050,00	
	Jumlah		11.134.693,00	
	Dec-23			
1	Telepon	0766-23644		
2	Air	11001502105	142.500,00	
3	Listrik	182300087068	10.624.865,00	
4	Internet	011-1519100806	1.052.300,00	
	Jumlah		11.819.665,00	

ONPAYS
PDAM KAB BENGKALIS
882FEBD9CA5A41FC
9D0C0C0D2F45412F

TGLBYR : 18-01-2023 12:36:26
NO PEL. : 11001502105
NAMA : KANTOR DISDALDUK
ALAMAT : JL HANGTUAH
GOL : R3
LN REK : Dec-2022

PEMAKAIAN : 28 M3
JML TGHN : RP. 141.000,00
ADMTN : RP. 2.500,00
TTL TGHN : RP. 143.500,00

MITRAFAKDOAN PJ5212025/CA/18-01-2023/12:36:24



ONPAYS
BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR PDAM KAB BENGKALIS
882FEBD9CA5A41FC9D0C0C0D2F45412F

NO PEL. : 11001502105
NAMA : KANTOR DISDALDUK
ALAMAT : JL HANGTUAH

TGL BAYAR : 18-01-2023 12:36:26
BLN REK : Dec-2022
MTR AW/AK : 2452-2490
PEMAKAIAN : 28 M3
GOL : R3

RINCIAN TAGIHAN

TAGIHAN : RP. 141.000,00
ADMIN : RP. 2.500,00
TOTAL : RP. 143.500,00

PDAM KAB BENGKALIS Menyatakan Resi ini
Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah.

  
MITRAFAKDOAN PJ5212025/CA/18-01-2023/12:36:24

SEGI PELUNASAN TELKOM PAY

BLTH: JAN23
TGL : 18/01/2023
NO : 0111519100806
NAMA: BASIC EDUCATION PROJECT
NPWP :
REF : 301A

TKG : Rp. 1.004.550,00
ADM : Rp. 2.500,00
SW : Rp. 1.007.050,00

REF: 6D55A8A2677B4D8B
755896E28BD7F

MITRAFADQANPJ521/
Maderlis/OPS
20230118123438/18012023 123525/CU1



STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN TELKOM PAY

BLN TAGIHAN : JAN23
NO TLP : 0111519100806
NAMA PLG : BASIC EDUCATION PROJECT
NPWP :
NO REF : 301A
RP TAGIHAN : Rp. 1.004.550,00
ADMIN : Rp. 2.500,00
TOTAL : Rp. 1.007.050,00
SWITCH REF : 6D55A8A2677B4D8BBD755896E28BD7F

TELKOM menyatakan struk ini
sebagai bukti pembayaran yang sah TERIMA KASIH

MITRAFADQANPJ521/MPI - Faderlis/OPS
20230118123438/18012023 123525/CU1

BANK BSB
PP BENGKALIS PONSEL
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
MEDIABISNIS01825
IDPEL : 182300087068
NAMA : BASIC EDUCATION P
TARIF/DAYA : P1/41500 VA
BL TH : JAN24
TGL BAYAR : 2024-01-22 09:46:23
STAND METER : 00689332-00695576
RP TAG PLN : Rp. 10.624.865
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 10.624.865
NOREF : 00UT213517740633
REF: A0F0955DD5C59

BANK BSB
PP BENGKALIS PONSEL/MEDIABISNIS01825
TGL BAYAR : 2024-01-22 09:46:23
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 182300087068
NAMA : BASIC EDUCATION P
TARIF/DAYA : P1/41500 VA
RP TAG PLN : Rp. 10.624.865
NO REF : 00UT213517740633
BL/TH : JAN24
STAND METER : 00689332-00695576

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 10.624.865
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat !"

097701537427/OPS/CA/
22012024 093209/CA



SEGI PEMBAYARAN TELKOM PAI
BLTH : JAN24
TGL : 22/01/2024
NO : 0111519100806
NAMA : BASIC EDUCATION PROJECT
NPWP :
REF : 401A
TAG : Rp. 1.049.800,00
ADM : Rp. 2.500,00
TOT : Rp. 1.052.300,00
3REF : 849523CE4CBD4300
8699E2DB7FFD82BF

SEGI PEMBAYARAN TAGIHAN TELKOM PAI
BLN TAGIHAN : JAN24
NO TLP : 0111519100806
NAMA PLG : BASIC EDUCATION PROJECT
NPWP :
NO REF : 401A
RP TAGIHAN : Rp. 1.049.800,00
ADMIN : Rp. 2.500,00
TOTAL : Rp. 1.052.300,00
SWITCH REF : 849523CE4CBD43008699E2DB7FFD82BF

TELKOM menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah TERIMA KASIH

MITRAFADQANPJ521/
MPI - Faderlis/OPS
22012024 093209/CA

MITRAFADQANPJ521/MPI - Faderlis/OPS
078761619908/22012024 093209/CA



NPAYS
KAB BENGKALIS
FF8D7CFD6C464FA0
5F756BF8A765CEB

ONPAYS
BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR PDAM KAB BENGKALIS
FF8D7CFD6C464FA0B5F756BF8A765CEB

SLBYR : 22-01-2024 09:49:36
NO PEL. : 11001502105
NAMA : KANTOR DISDALDUK
ALAMAT : JL HANGTUAH
JL : R3
BLN REK : Dec-2023
PEMAKAIAN : 26 M3
JML TGHN : Rp. 140.000,00
ADMIN : Rp. 2.500,00
JML TGHN : Rp. 142.500,00

NO PEL. : 11001502105
NAMA : KANTOR DISDALDUK
ALAMAT : JL HANGTUAH
TGL BAYAR : 22-01-2024 09:49:36
BLN REK : Dec-2023
MTR AW/AK : 2730-2756
PEMAKAIAN : 26 M3
JML TGHN : R3

RINCIAN TAGIHAN
TAGIHAN : Rp. 140.000,00
ADMIN : Rp. 2.500,00
TOTAL : Rp. 142.500,00

PDAM KAB BENGKALIS Menyatakan Resi ini sebagai Bukti Pembayaran yang Sah.

MITRAFADQANPJ521/
OPS/CA/
22-01-2024 09:49:37

MITRAFADQANPJ521/OPS/CA/TIRTA DHARMA 24/09:49:37





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RINCIAN ASET YANG BERASAL DARI SKPD LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Barang	Merek/Type	Asal Pengadaan	Volume	Ukuran Satuan	Harga Perolehan		Keterangan
						Satuan Harga	Jumlah Harga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10) = (5) x (9)	(11)
HAK PENGUASAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CQ. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS								
Peralatan dan Mesin								
1	Mobil	TOYOTA INNOVA VENTURER	APBD 2022	1,00	Unit	527.500.000,00	527.500.000,00	BA Nomor : 0900/BPKAD-ASET/I/BA-ST/2023/04 TGL 12 JANUARI 2023
2	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125 CW HELM IN INJECTION	APBD 2013	1,00	Unit	16.737.800,00	16.737.800,00	BA Nomor: 180/SETDA-HK/BRG/2023/36 TGL 16 FEB 2023
3	Mobil	RUSH 1,5S F700RE GMM-FJ BM 1658 D	APBD 2007	1,00	Unit	165.990.000,00	165.990.000,00	
JUMLAH ASET YANG BERASAL DARI SKPD LAIN TAHUN 2023							710.227.800,00	

NB: BERITA ACARA TERLAMPIR DI HALAMAN BELAKANG

PENGURUS BARANG

YESMAR
NIP. 19720830 20091 1 033

Bengkalis, Februari 2024

Mengetahui

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

H. HAMBALI, S.Pd.I
PEMBINA TK. I
NIP. 19670305 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712
Telp.(0766) 21255 Fax. (0766) 21687 Email :
Website :www.bengkalis.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 900/BPKAD-ASET/I/BA-ST/2023/04

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. BUSTAMI, HY, SH, MM**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkulu, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 070 Bengkulu
2. Nama : **H. HAMBALI, S.Pd. I**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penyerahan berupa Kendaraan Dinas/Operasional dalam keadaan baik (daftar terlampir).

Kendaraan Dinas/Operasional tersebut digunakan sebagai **Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu**, dan harus dicatat/dimasukkan dalam daftar inventaris aset tetap bergerak milik SKPD dimaksud.

Setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini, maka berpindahlah hak dan tanggungjawab terhadap pemakaian/pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di Bengkulu pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS,

H. HAMBALI, S.Pd. I
NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
SELAKU PENGELOLA BARANG,

H. BUSTAMI, HY, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640907 198603 1 009

BERITA ACARA MUTASI KENDARAAN RODA DUA

Nomor : 180/SETDA-HK/BRG/2023/36

Pada hari Senin tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **MOHD. FENDRO ARRASYID, SH**
NIP : 19820706 201001 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **H.HAMBALI, S.Pd.I**
NIP : 19670305 198811 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penyerahan berupa Kendaraan Dinas dalam keadaan baik dengan rincian sebagai berikut:

Merk / Type Kendaraan : SUPRA X 125 CW HELM IN INJECTION
Nomor Polisi : BM 3488 D
Warna : HITAM
Nomor Rangka : MH1JBG111DK132543
Nomor Mesin : JBG1E 1131571
Isi Silinder : 125 CC
Asal Pengadaan : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013
Banyaknya : 1 Unit

Kendaraan Dinas tersebut di Mutasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dan harus dicatat/dimasukkan dalam daftar inventaris aset tetap bergerak milik SKPD dimaksud.

Setelah ditandatangani Berita Serah Terima ini, maka berpindahlah hak dan tanggung jawab terhadap pemakaian/pemeliharaan Kendaraan Dinas tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di Bengkalis pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis


H. HAMBALI, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bengkalis


MOHD. FENDRO ARRASYID, SH
Penata Tk. I
NIP. 19820706 201001 1 009

MENGETAHUI,
SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Pengelola Barang


H. BUSTAMI.HY, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640907 198603 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RINCIAN ASET YANG DISERAHKAN KE SKPD LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Barang	Merek/Type	Asal Pengadaan	Volume	Ukuran Satuan	Harga Perolehan		Keterangan
						Satuan Harga	Jumlah Harga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10) = (5) x (9)	(11)
Peralatan dan Mesin								
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	Nissan Livina 1r8 Ultimate AiT / BM 1190 DP	APBD 2009	1,00	Unit	273.226.800,00	273.226.800,00	BAST:No. 02/BAPP/KEU-PERL/X/2023 Tgl: 12 OKTOBER 2023
2	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	NISSAN X. TRAIL 2.0 cvT (4x2) AiT / BM 1523 D	APBD 2012	1,00	Unit	355.910.472,57	355.910.472,57	
JUMLAH ASET YANG DISERAHKAN KE SKPD LAIN TAHUN 2021							629.137.272,57	

NB: BERITA ACARA TERLAMPIR DI HALAMAN BELAKANG

PENGURUS BARANG

YESMAR

NIP. 19720830 20091 1 033

Bengkalis, Februari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I

PEMBINA TK. I

NIP. 19670305 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Hang Tuah No. 08 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 23645 Fax. (0766) 23644 Email : dppkbbengkalis@gmail.com
Website : www.disdalduk-kb.bengkalis.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

NOMOR : 02/BAPP/KEU-PERL/X/2023

TANGGAL : 12 Oktober 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. HAMBALI, S.Pd.I**
NIP : 19670305 198811 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dr. H. AREADY, SE., M.Si**
NIP : 19750302 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dalam keadaan rusak berat dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merk / Type/BM	Asal Usul Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	Nissan Livina 1,8 Ultimate A/T / BM 1190 DP	Pengadaan 2009	1 Unit			Rusak Berat

Kendaraan Dinas tersebut dalam keadaan Rusak Berat yang tidak bisa di Operasional lagi Sehubungan dengan hal tersebut akan mengembalikan kendaraan Dinas Roda 4 (empat) ke gudang perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu.

Setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini, maka berpindahlah hak dan tanggungjawab terhadap Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar dan ditandatangani di Bengkulu pada hari ini dan sebagai tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. H. AREADY, SE., M.Si
NIP. 19750302 200212 1 004

H. HAMBALI, S.Pd.I
NIP. 19670305 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Hang Tuah No. 08 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 23645 Fax. (0766) 23644 Email : dppkbbengkalis@gmail.com
Website : www.disdalduk-kb.bengkalis.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

NOMOR : 02/BAPP/KEU-PERL/X/2023

TANGGAL : 12 Oktober 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. HAMBALI, S.Pd.I**
NIP : 19670305 198811 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dr. H. AREADY, SE., M.Si**
NIP : 19750302 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dalam keadaan rusak berat dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merk / Type/BM	Asal Usul Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	NISSAN X-TRAIL 2.0 CVT (4X2) A/T / BM 1523 D	Pengadaan 2012	1 Unit			Rusak Berat

Kendaraan Dinas tersebut dalam keadaan Rusak Berat yang tidak bisa di Operasional lagi Sehubungan dengan hal tersebut akan mengembalikan kendaraan Dinas Roda 4 (empat) ke gudang perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu.

Setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini, maka berpindahlah hak dan tanggungjawab terhadap Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar dan ditandatangani di Bengkulu pada hari ini dan sebagai tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

Dr. H. AREADY, SE., M.Si
NIP. 19750302 200212 1 004

PIHAK PERTAMA

H. HAMBALI, S.Pd.I
NIP. 19670305 198811 1 001